

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI  
DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI ACEH**



**Disusun Oleh:**

**SAFRINA NABILA  
NIM. 210604003**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safrina Nabila  
NIM : 210604003  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R Banda Aceh, 30 Januari 2026

Yang Menyatakan



Safrina Nabila

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran  
Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  
Di Provinsi Aceh**

Disusun Oleh:

Safrina Nabila  
NIM: 210604003

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si  
NIP. 19720428199931005

Pembimbing II,

Nanda Nur Sofyana, S.E., M.App. Ec., M.Si  
NIP. 19930422202505200

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,

Ismuadi, S.E., S.Pd., M.Si  
NIP. 198601282019031005

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran  
Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  
Di Provinsi Aceh**

Safrina Nabila  
NIM: 210604003

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 30 Januari 2026 M  
11 Sya'ban 1447 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si  
NIP. 19720428199931005

Sekretaris,

Nanda Nur Sofyana, S.E., M.App. Ec., M.Si  
NIP. 19930422202505200

Pengujian I,

Dr. Maimun, S.E., Ak. M.Si  
NIP. 197009171997031002

Pengujian II,

Dr. Idaryani, S.E., M.Si  
NIP. 197505052025212011

**AR - RANIRY**  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furtqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Safrina Nabila  
NIM : 210604003  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmui Ekonomi  
E-mail : 210604003@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 30 Januari 2026 M A N I R Y

Mengetahui,

Penulis,

Safrina Nabila  
NIM: 210604003

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si  
NIP. 19720428199931005

Pembimbing II,

Nanda Nur Sofyana, S.E., M.App. Ec., M.Si  
NIP. 19930422202505200

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā atas rahmat, hidayah, serta anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh”** sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallāhu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang tetap berpegang teguh pada ajaran dan sunnahnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selama proses penulisan, penulis memperoleh banyak dukungan berupa bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ismuadi, SE, S.Pd.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Banda Aceh dan Uliya Azra, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan nasehat-nasehat, arahan, masukan, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Nanda Nur Sofyana, S.E., M.App. Ec., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta pikiran dalam memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing serta memberikan nasihat dan motivasi terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
6. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Untuk cinta pertama dan panutan penulis yaitu Ayah tercinta, Usmadi dan pintu syurga yaitu Ibu tercinta penulis, Ibu Hasanah, dua orang ini yang selalu mengusahakan yang terbaik apapun itu untuk putri pertama mereka ini agar bisa mencapai cita-cita setinggi-tingginya, yang selalu memberikan dukungan baik secara finansial hingga materi dari penulis

terlahir didunia sampai berada dititik sekarang ini untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Disertai doa, dukungan, semangat dan cintanya yang tidak pernah pudar sedikitpun yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dari awal kuliah sampai bias terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat membuat Ayah dan Bunda bangga. Saudari-saudari tersayang penulis yakni Ikhsan Muliadi dan Tasya Najua yang turut memberikan doa, dukungan, dan motivasi yang sangat amat berharga.

8. Teman seperjuangan Chyntia, Maula, serta teman-temann sejurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2021 yang telah membantu serta memberikan saran berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi substansi maupun sistematika penyajian. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka dan penuh kerendahan hati mengharapkan serta menerima masukan berupa kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dunia akademik.

Banda Aceh, 30 Januari 2026  
Penulis

Safrina Nabila

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ئ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qāla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-aṭ-ḥāl/ raudatul aṭ-ḥāl :*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/ :*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madīnatul Munawwarah*

*Ṭalḥah :*

طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.

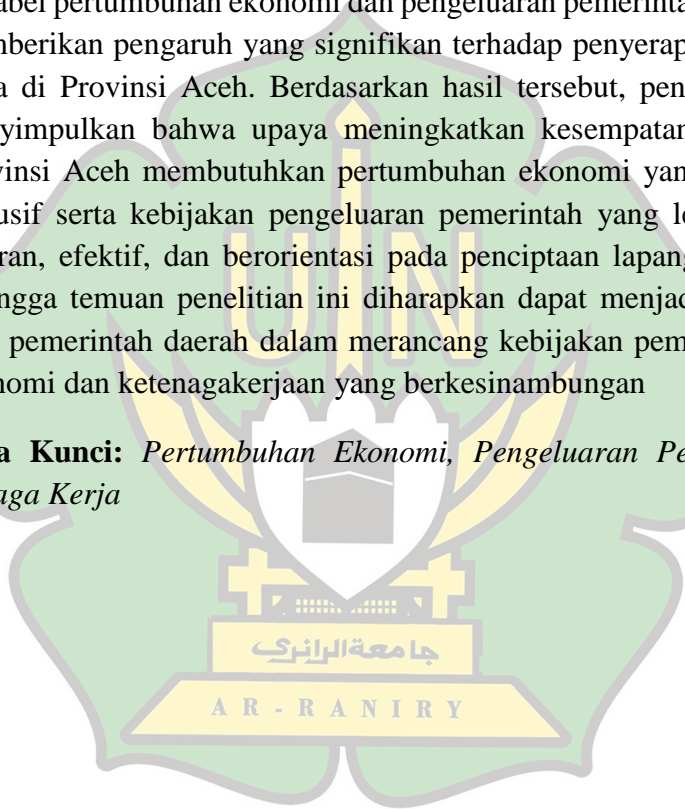
## ABSTRAK

Nama : Safrina Nabila  
NIM : 210604003  
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu  
Ekonomi  
Judul : Analisis Pengaruh Pertumbuhan  
Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah  
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di  
Provinsi Aceh  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si  
Pembimbing II : Nanda Nur Sofyana, S.E., M.App. Ec.,  
M.Si

Provinsi Aceh, yang termasuk wilayah dengan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk usia kerja dari tahun ke tahun, hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan di bidang ketenagakerjaan, walaupun indikator makro seperti laju pertumbuhan ekonomi dan besaran belanja pemerintah menunjukkan pergerakan yang berubah-ubah. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji dan menjelaskan sejauh mana pertumbuhan ekonomi serta pengeluaran pemerintah memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah Provinsi Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), mencakup 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2024. Model estimasi yang diterapkan adalah *Fixed Effect Model* (FEM), yang ditetapkan sebagai model terbaik berdasarkan hasil pengujian Chow dan Hausman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara individual pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh,

yang menandakan bahwa penguatan kegiatan ekonomi berpotensi memperluas kesempatan kerja. Sebaliknya, belanja pemerintah justru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang mengisyaratkan bahwa penggunaan anggaran publik belum sepenuhnya difokuskan pada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Secara bersama-sama, variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Aceh membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif serta kebijakan pengeluaran pemerintah yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, sehingga temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang berkesinambungan

**Kata Kunci:** *Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja*

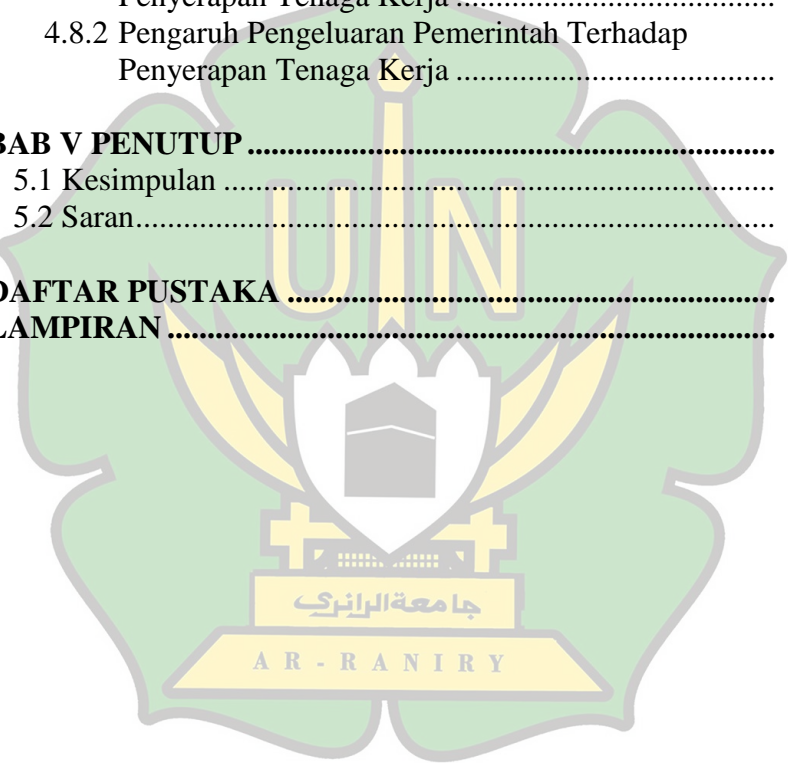


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
1.5 Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>25</b>
2.1 Penyerapan Tenaga Kerja.....	25
2.1.1 Indikator Penyerapan Tenaga Kerja.....	29
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja.....	34
2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	39
2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli ...	41
2.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi .....	45
2.2.3 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi.....	47
2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	49
2.3 Pengeluaran Pemerintah.....	50
2.3.1 Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat Provinsi.....	53
2.3.2 Komponen Belanja APBD .....	56
2.3.3 Pembiayaan APBD.....	58

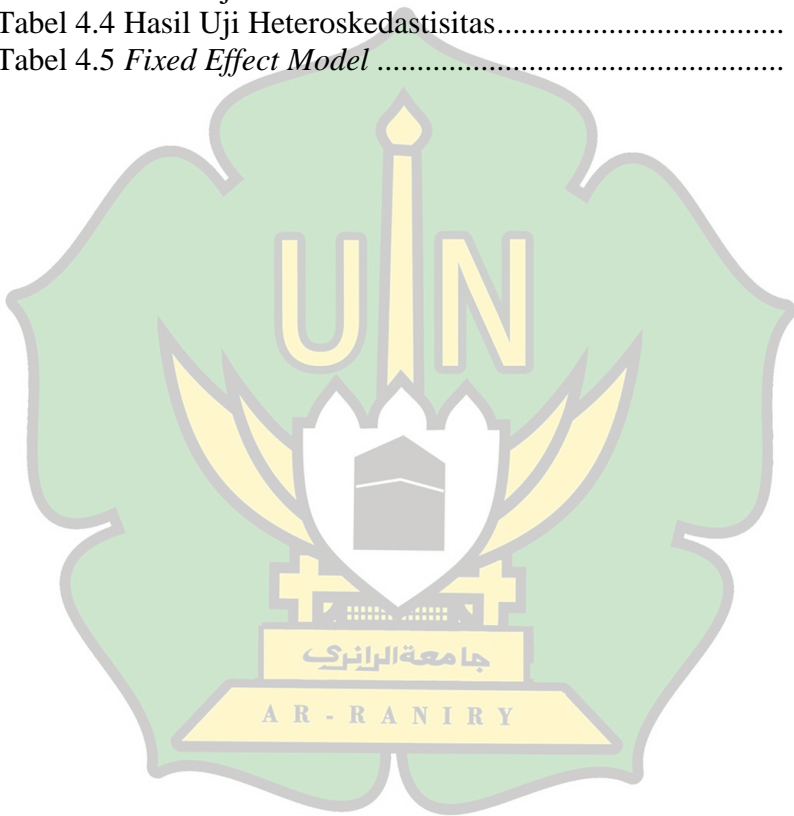
2.3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat Kabupaten/Kota .....	60
2.3.5 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	61
2.4 Keterkaitan Antar Variabel .....	63
2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	63
2.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	65
2.5 Penelitian Terkait .....	67
2.5 Kerangka Berpikir .....	71
2.6 Hipotesis Penelitian.....	71
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	73
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	73
3.3 Sampel Penelitian .....	74
3.4 Variabel Penelitian .....	75
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	75
3.6 Model Analisis Data.....	77
3.7 Teknik Analisis Data.....	78
3.8 Pemilihan Model Estimasi .....	81
3.9 Uji Asumsi Klasik.....	83
3.9.1 Model Analisis Data.....	83
3.9.2 Uji Heteroskedastisitas.....	83
3.10 Uji Hipotesis .....	84
3.10.1 Uji Parsial (Uji t).....	84
3.10.2 Uji Simultan (Uji F) .....	85
3.11 Koefisien Determinasi.....	86
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>87</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	87
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	89
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	92
4.2.2 Pengeluaran Pemerintah.....	95
4.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja.....	97
4.3 Analisis Penentuan Model Regresi Data Panel.....	99
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	101
4.4.1 Uji Multikolinearitas .....	102

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	103
4.5 Model Regresi Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	103
4.6 Pengujian Hipotesis.....	106
4.6.1 Uji Parsial (Uji T).....	106
4.6.2 Uji Simultan .....	107
4.7 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	108
4.8 Pembahasan.....	109
4.8.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	109
4.8.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	111
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
5.1 Kesimpulan .....	113
5.2 Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>123</b>



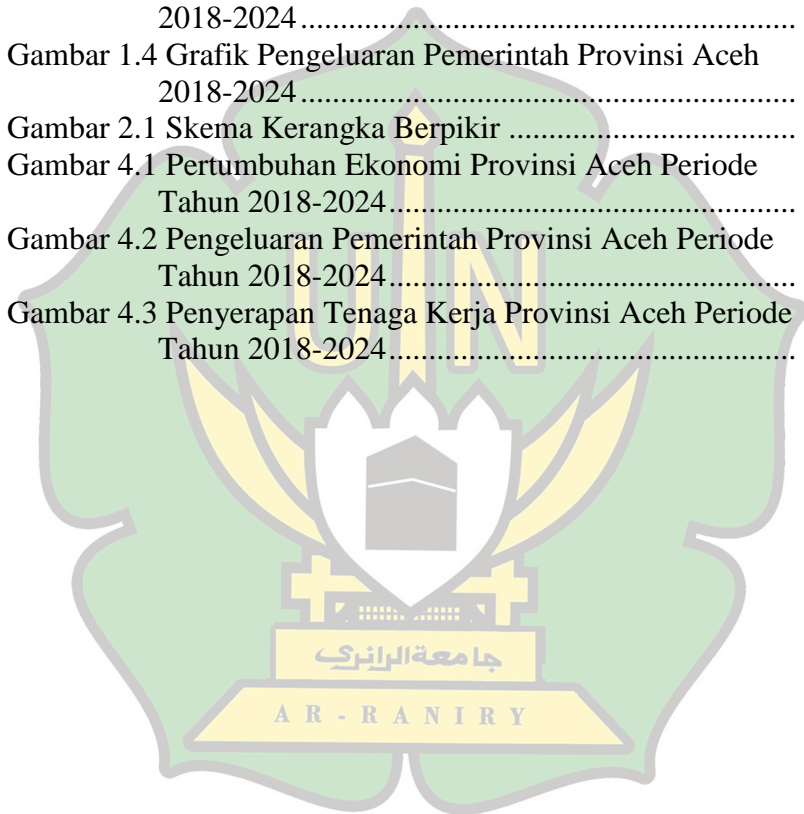
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	67
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	76
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif .....	90
Tabel 4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	100
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas .....	102
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	103
Tabel 4.5 <i>Fixed Effect Model</i> .....	104



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Bekerja di Indonesia 2018-2024.....	5
Gambar 1.2 Grafik Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Aceh 2018-2024.....	9
Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2018-2024.....	13
Gambar 1.4 Grafik Pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh 2018-2024.....	16
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir .....	71
Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Periode Tahun 2018-2024.....	93
Gambar 4.2 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh Periode Tahun 2018-2024.....	96
Gambar 4.3 Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Aceh Periode Tahun 2018-2024.....	98



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Variabel .....	123
Lampiran 2 Hasil-Hasil Uji .....	128



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Isu ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi persoalan krusial karena berkaitan dengan tantangan yang bersifat struktural sekaligus berkembang secara dinamis, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kapasitas perekonomian nasional dalam menyediakan kesempatan kerja yang layak, stabil, dan berkesinambungan. Tingkat penyerapan tenaga kerja sering digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia yang saat ini berada dalam arus perubahan besar akibat globalisasi serta percepatan transformasi teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk yang berhasil masuk ke dunia kerja di Indonesia memang memperlihatkan kecenderungan meningkat, namun kondisi pasar kerja pada tahun 2025 tetap dihadapkan pada situasi yang cukup rumit. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Februari 2025 total pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta jiwa, mengalami kenaikan sekitar 83.450 orang atau setara 1,11 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, jumlah angkatan kerja nasional juga bertambah sekitar 3,67 juta orang, yang mencerminkan semakin besarnya populasi usia produktif yang siap memasuki pasar kerja dan memiliki keinginan untuk bekerja.

Akan tetapi, peningkatan jumlah orang yang bekerja tersebut belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja, sehingga masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terserap dan tetap berada dalam kategori pengangguran (Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,76 Persen. Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3.09 Juta Rupiah, 2025).

Situasi tersebut menggambarkan bahwa laju penciptaan kesempatan kerja belum sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja, sehingga masih terdapat kelompok usia produktif yang belum terserap dan memunculkan ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaannya. Kesenjangan ini tidak muncul secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh beragam faktor struktural, seperti ketidakselarasan kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha, terbatasnya arus investasi pada sektor-sektor padat karya yang sejatinya mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar, serta melambatnya laju ekspansi pada beberapa bidang ekonomi strategis. Di samping itu, perubahan karakter pekerjaan sebagai dampak perkembangan teknologi digital dan penerapan otomatisasi turut menggeser tatanan pasar kerja, di mana sejumlah jenis pekerjaan konvensional mengalami penyusutan dan secara bertahap digantikan oleh peran teknologi, sehingga menuntut penyesuaian kemampuan tenaga kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan

zaman.

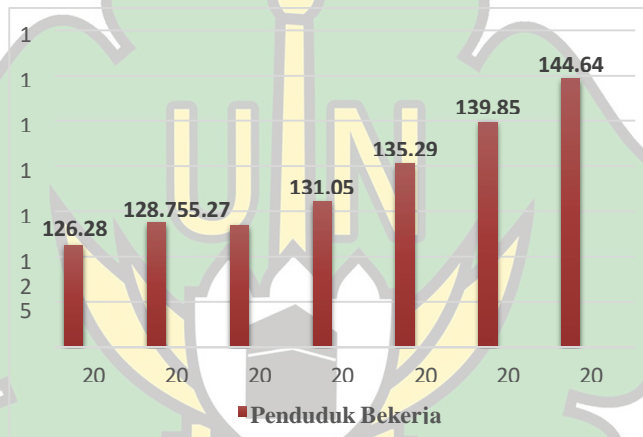
Kondisi penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada masa kini berada dalam situasi yang cukup dinamis karena dipengaruhi oleh tekanan dan perubahan lingkungan global, namun di sisi lain tetap memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional. Dalam rentang waktu Februari 2024 sampai dengan Februari 2025, tercatat terciptanya sekitar 3,59 juta kesempatan kerja baru yang tersebar di sejumlah sektor strategis, terutama pada bidang perdagangan, pertanian, serta industri pengolahan yang menjadi penyumbang terbesar dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Meskipun capaian tersebut mencerminkan arah pertumbuhan yang konstruktif, struktur ketenagakerjaan Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, seperti besarnya proporsi pekerja yang berada pada sektor informal serta masih kuatnya dominasi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah hingga menengah, yang pada akhirnya berdampak pada mutu dan tingkat produktivitas sumber daya manusia. Selain itu, perkembangan pasar kerja nasional juga tidak terlepas dari karakteristik demografis Indonesia, di mana jumlah penduduk yang berada pada usia produktif jauh melampaui kelompok usia nonproduktif, sehingga menciptakan potensi sekaligus tantangan dalam penyediaan kesempatan kerja yang layak. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 145.777,18 ribu orang, meningkat

dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 144.642,00 ribu orang, sehingga terjadi penambahan sekitar 1.135,28 ribu tenaga kerja dalam kurun satu tahun. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan positif dalam pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia, meskipun tetap memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh (Badan Pusat Statistik, 2025).

Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan mendasar di bidang ketenagakerjaan, khususnya pengangguran struktural yang bersifat jangka panjang. Jenis pengangguran ini muncul akibat tidak selarasnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, kondisi yang kerap dipicu oleh kemajuan teknologi, perubahan pola produksi, serta pergeseran struktur ekonomi dalam skala yang cukup signifikan. Permasalahan pengangguran tersebut tidak dapat diatasi secara parsial, melainkan menuntut upaya pembangunan nasional yang terencana dan berkelanjutan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui perluasan lapangan kerja serta pemanfaatan tenaga kerja secara efektif, adil, dan optimal. Isu kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja pada dasarnya merupakan konsekuensi dari berbagai bentuk ketidakseimbangan struktural yang masih melekat dalam

perekonomian Indonesia. Selain itu, struktur ekonomi nasional yang hingga kini masih banyak bertumpu pada sektor pertanian belum mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga belum mampu menampung pertambahan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Daeng GS, 2020).

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Penduduk Bekerja di Indonesia Periode Tahun 2018-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Merujuk pada ilustrasi pada grafik 1.1, dapat dipahami bahwa besaran penduduk yang terserap dalam kegiatan kerja di setiap provinsi di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Selama rentang waktu 2018 hingga 2024, jumlah penduduk bekerja memperlihatkan perubahan naik dan turun dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kondisi ekonomi serta situasi sosial yang terjadi di masing-masing wilayah. Capaian jumlah penduduk bekerja paling tinggi tercatat pada tahun 2024 dengan

total sebesar 144.642,00 ribu orang, yang mencerminkan adanya dorongan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat disertai peningkatan belanja pemerintah sehingga mampu mendorong terbentuknya kesempatan kerja baru. Di samping itu, bertambahnya penduduk usia produktif yang secara aktif masuk ke pasar kerja turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Sebaliknya, tingkat penduduk bekerja terendah terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 126.282,19 ribu orang, kondisi ini dipengaruhi oleh situasi perekonomian yang belum berkembang secara optimal, minimnya investasi, serta keterbatasan alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, ditambah lagi dengan adanya ketidakharmonisan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja yang menghambat proses penyerapan. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia selama periode pengamatan tersebut berada pada angka 133.476,181 ribu jiwa, yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan nasional dalam kurun waktu tersebut.

Penyerapan tenaga kerja dapat dipahami sebagai kondisi ketika penduduk usia kerja memperoleh kesempatan kerja sehingga mampu menjalankan aktivitas produktif dan ikut memberikan sumbangan terhadap kegiatan ekonomi. Keberadaan tenaga kerja yang bekerja pada dasarnya muncul karena adanya kebutuhan atau permintaan dari dunia usaha dan sektor produksi, sehingga konsep penyerapan tenaga kerja sering

diposisikan sejalan dengan konsep permintaan tenaga kerja itu sendiri. Tinggi rendahnya tingkat penyerapan tersebut tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi yang saling berkaitan. Faktor-faktor yang berperan antara lain besaran upah yang berlaku, kapasitas dan nilai hasil produksi, pola serta struktur perekonomian yang berkembang, ketersediaan dan efektivitas penggunaan modal dalam proses produksi, serta tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang mencerminkan seberapa besar penduduk usia kerja terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja merupakan hasil interaksi antara permintaan tenaga kerja dari sisi produksi dan karakteristik tenaga kerja dari sisi penduduk, sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro (2002).

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi dinamika ketenagakerjaan cukup kompleks, ditandai dengan besarnya populasi penduduk usia produktif yang cenderung bertambah dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan daerah dalam menyediakan kesempatan kerja yang memadai. Bertambahnya jumlah penduduk yang masuk ke pasar tenaga kerja secara langsung menuntut ketersediaan lapangan pekerjaan dalam skala yang lebih luas, tetapi kondisi riil menunjukkan bahwa peluang kerja tumbuh lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan angkatan kerja. Situasi ini diperparah oleh

peningkatan jumlah pencari kerja yang berlangsung relatif cepat, sementara kapasitas penyerapan tenaga kerja masih terbatas sehingga tidak semua individu usia kerja dapat memperoleh pekerjaan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2024 mencatat bahwa total angkatan kerja telah mencapai sekitar 2,6 juta jiwa, dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) sebesar 0,34 persen dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal penyerapan tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2025). Keadaan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah angkatan kerja tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang seimbang, sehingga menimbulkan tantangan struktural bagi proses pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penyerapan tenaga kerja menjadi aspek yang sangat krusial, tidak hanya untuk menurunkan tingkat pengangguran, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat basis pertumbuhan ekonomi Aceh agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

**Grafik 1.2**  
**Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Aceh Periode Tahun 2018-2024**



*Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)*

Berdasarkan ilustrasi yang disajikan, dapat dipahami bahwa kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh menunjukkan pola yang tidak stabil dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, di mana jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Puncak jumlah penduduk bekerja tercatat pada tahun 2024 dengan angka sekitar 2.661.283 orang, yang merefleksikan adanya perbaikan situasi perekonomian daerah serta terbukanya berbagai lapangan pekerjaan baru. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh peran sektor informal, seperti kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang masih menjadi tumpuan utama dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, bertambahnya kelompok usia produktif serta meningkatnya keterlibatan mereka

dalam aktivitas ekonomi turut memperkuat peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Sebaliknya, angka penduduk bekerja terendah terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah sekitar 2.395.586 orang, yang dipengaruhi oleh keterbatasan perkembangan ekonomi daerah dan minimnya investasi pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Dampak lainnya terlihat pada terbatasnya peluang kerja yang tersedia, ketidakseimbangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha, serta masih besarnya proporsi penduduk yang belum tergolong dalam angkatan kerja. Secara keseluruhan, jika dilihat dari nilai rata-rata selama periode pengamatan, jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Aceh berada pada kisaran 2.523.679 orang, yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang masih memerlukan penguatan dari sisi kualitas maupun ketersediaan lapangan kerja.

Dalam perspektif makroekonomi, tingkat penyerapan tenaga kerja dalam suatu sistem perekonomian dipengaruhi oleh beragam determinan, salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang terlampir dalam buku karangan Usman, dan rekan-rekan (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencerminkan persoalan fundamental yang dihadapi negara dalam horizon jangka panjang karena sering dijadikan indikator utama untuk menilai keberhasilan proses pembangunan nasional, di mana manfaat dari capaian tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok

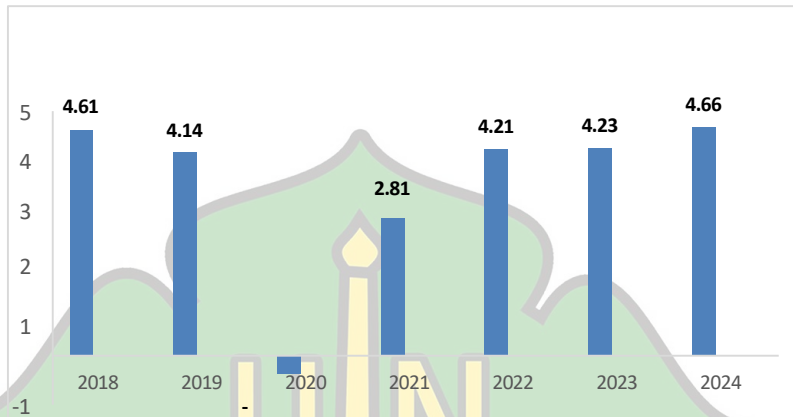
terbawah. Negara yang mampu mempertahankan peningkatan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan umumnya dipandang memiliki kinerja ekonomi yang positif dan stabil. Namun demikian, apabila peningkatan output dan aktivitas ekonomi tersebut tidak disertai dengan perluasan lapangan kerja, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, memperlebar kesenjangan sosial, serta pada akhirnya mendorong peningkatan tingkat kemiskinan di masyarakat (Purba & Damanik, 2024).

Perekonomian dapat dipahami sebagai gambaran tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam suatu masyarakat yang berujung pada terciptanya peningkatan pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Suatu kondisi ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila imbal hasil riil yang diterima dari pemanfaatan seluruh faktor produksi pada periode berjalan menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan riil masyarakat pada periode sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah, khususnya dalam konteks negara berkembang. Kecepatan peningkatan output nasional mencerminkan kemajuan struktur dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pengukuran pertumbuhan ekonomi yang umumnya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat wilayah

menggambarkan adanya upaya sistematis untuk memperbesar kemampuan produksi, sehingga perekonomian mampu menghasilkan jumlah barang dan jasa yang semakin meningkat dari waktu ke waktu (Larasati & Utomo, 2023).

Perkembangan ekonomi pada tingkat wilayah dapat direpresentasikan melalui besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu daerah. PDRB menggambarkan akumulasi nilai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah, yang dihitung dari seluruh nilai tambah barang maupun jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor usaha dan unit produksi selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian, PDRB tidak hanya menunjukkan kapasitas produksi daerah, tetapi juga mencerminkan struktur serta dinamika perekonomian regional secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, indikator pertumbuhan ekonomi dianalisis melalui perubahan nilai PDRB Provinsi Aceh dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kecepatan dan arah perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Perubahan PDRB tersebut menjadi cerminan peningkatan maupun perlambatan aktivitas ekonomi lokal yang terjadi. Selanjutnya, disajikan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk periode tahun 2018 hingga 2024 sebagai dasar analisis lebih lanjut.

**Grafik 1.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Periode Tahun 2018-2024**



*Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)*

Berdasarkan visualisasi data yang disajikan, dapat dipahami bahwa laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2018 sampai dengan 2024 mengalami perubahan yang naik dan turun, menggambarkan kondisi perekonomian yang bergerak dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Capaian pertumbuhan paling optimal tercatat di Provinsi Aceh pada tahun 2024 dengan angka mencapai 4,66 persen, yang tidak terlepas dari meningkatnya intensitas kegiatan ekonomi lintas sektor. Sektor pertanian masih memegang peranan dominan dengan sumbangan sebesar 30,97 persen terhadap pembentukan PDRB Aceh, sementara pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh–Sumut turut mendorong perputaran ekonomi melalui peningkatan permintaan pada sektor jasa keuangan, transportasi,

hingga pertambangan, sehingga berkontribusi pada percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi. Sebaliknya, kondisi terlemah terjadi pada tahun 2020 ketika Provinsi Aceh mencatat pertumbuhan negatif sebesar -0,37 persen, yang dipicu oleh merebaknya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan perlambatan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di berbagai lapangan usaha. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh berada pada kisaran 3,47 persen, yang menunjukkan bahwa meskipun perekonomian sempat tertekan akibat guncangan eksternal, khususnya krisis kesehatan global, kinerja ekonomi tetap mampu bangkit seiring dengan dukungan kebijakan pemerintah serta daya tahan sektor-sektor utama dalam menjaga kesinambungan dan stabilitas pembangunan ekonomi daerah (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025).

Dampak lain yang turut muncul dari dinamika pasar tenaga kerja berkaitan erat dengan peran belanja negara dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Alokasi anggaran pemerintah yang direalisasikan melalui berbagai program ekonomi berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya tambahan aliran pendapatan ke rumah tangga. Peningkatan kemampuan konsumsi tersebut selanjutnya akan memicu kenaikan permintaan secara keseluruhan dalam perekonomian, yang pada gilirannya mendorong pelaku usaha untuk merespons dengan memperluas kapasitas serta volume produksinya.

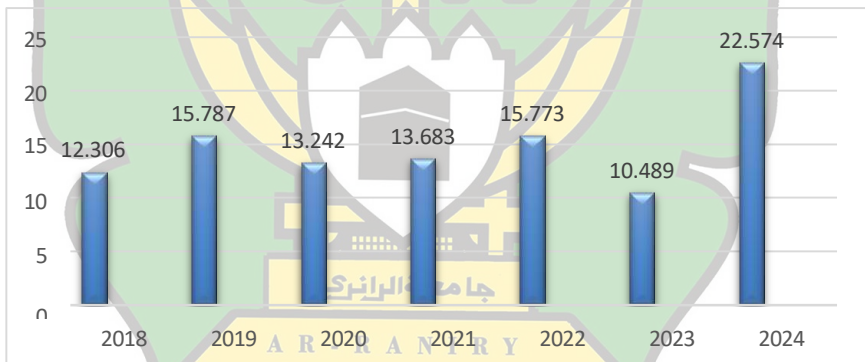
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa belanja negara, terutama yang bersumber dari pengeluaran modal dan konsumsi pemerintah, pernah berkontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, persoalan penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan yang mendesak, mengingat sektor-sektor yang bersifat padat karya seperti pertanian, bidang konstruksi, dan aktivitas perdagangan belum mampu memanfaatkan dorongan fiskal tersebut secara maksimal untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas.

Dalam teori Keynesian, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan dan tingkat *output* (Gregory, 2003). Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi (Pratiwi & Indrajaya, 2019).

Dalam ekonomi makro, pengeluaran pemerintah mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk membiayai berbagai kegiatan negara. Ini termasuk belanja rutin seperti gaji pegawai negeri, subsidi, dan bunga utang, serta belanja pembangunan seperti investasi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Sukirno, 2011).

Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja (Sukirno, 2011).

**Grafik 1.4**  
**Pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh Periode Tahun 2018-2024**



Sumber: DJPK Provinsi Aceh (2024)

Berdasarkan ilustrasi yang ditampilkan, dapat dipahami bahwa kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh menunjukkan pola yang tidak stabil atau berfluktuasi sepanjang tujuh tahun terakhir, yang mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam periode

tersebut, belanja pemerintah daerah mencapai titik paling tinggi pada tahun 2024 dengan nilai sekitar 22.574 miliar rupiah, yang terjadi seiring meningkatnya realisasi anggaran pada sejumlah sektor strategis. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh besarnya alokasi dana untuk bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pertanian, serta berbagai program pembangunan lainnya yang menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, meningkatnya program-program pemerintah serta bertambahnya transfer dana dari pemerintah pusat turut berkontribusi terhadap melonjaknya pengeluaran daerah pada tahun tersebut. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh berada pada level terendah pada tahun 2023, yakni sekitar 10.489 miliar rupiah, yang disebabkan oleh adanya kebijakan pembatasan belanja serta penyesuaian anggaran sebagai respons terhadap kondisi fiskal dan penerapan pengelolaan keuangan yang lebih ketat dan berhati-hati. Secara keseluruhan, jika dilihat dari rata-ratanya, besaran pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh selama periode pengamatan berada pada kisaran 14.836 miliar rupiah, yang menggambarkan kapasitas belanja daerah dalam mendukung aktivitas pembangunan dan perekonomian regional.

Secara teoretis, belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah berperan sebagai instrumen fiskal yang mampu mendorong kenaikan permintaan total dalam perekonomian, sehingga aktivitas produksi mengalami peningkatan dan peluang kerja menjadi semakin luas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap

akselerasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hubungan yang terjadi secara bersamaan antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat menggambarkan dinamika serta kerumitan struktur ekonomi pada tingkat wilayah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Temuan empiris mutakhir mengindikasikan bahwa keterlambatan maupun penurunan dalam realisasi anggaran belanja negara dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja, sehingga upaya pengelolaan dan pengoptimalan belanja publik menjadi faktor yang sangat penting untuk mempertahankan kesinambungan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil kajian terdahulu yang dilakukan oleh Yanda *et al.* (2022) mengemukakan bahwa laju pertumbuhan perekonomian justru menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah Sulawesi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi tidak selalu diikuti oleh bertambahnya jumlah penduduk yang terserap dalam pasar kerja, bahkan dapat menyebabkan penurunan proporsi tenaga kerja secara nyata. Temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Sabihi *et al.* (2021) yang membuktikan adanya keterkaitan searah antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, di mana peningkatan kinerja ekonomi secara statistik terbukti mampu mendorong bertambahnya kesempatan kerja, khususnya melalui kenaikan Produk Domestik Regional Bruto

pada berbagai sektor usaha yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru. Selaras dengan pandangan tersebut, penelitian terbaru oleh Purba dan Damanik (2024) juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi daerah memberikan dampak positif dan bermakna terhadap kemampuan wilayah dalam menyerap tenaga kerja, sebagaimana dibuktikan melalui studi yang dilakukan di Kabupaten Samosir.

Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2021) menunjukkan bahwa belanja pemerintah memberikan dampak negatif serta tidak memiliki signifikansi statistik terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan besaran pengeluaran pemerintah tidak secara langsung mendorong peningkatan kesempatan kerja, karena anggaran yang tersedia cenderung disebar ke berbagai sektor pembangunan sehingga perhatian terhadap program pelatihan tenaga kerja maupun pendanaan yang berkaitan langsung dengan aspek ketenagakerjaan menjadi kurang optimal. Kondisi ini menyebabkan alokasi belanja publik belum mampu menghasilkan kontribusi yang substansial dalam memperluas penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Dengan kata lain, pola distribusi anggaran pemerintah yang tidak terfokus pada sektor ketenagakerjaan membuat dampaknya terhadap pasar kerja relatif lemah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Rompas (2024) yang justru menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik kebijakan fiskal dan efektivitas implementasinya antar daerah.

Berdasarkan fenomena dan data empiris dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di di Provinsi Aceh?
2. Berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh?
3. Berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di di Provinsi Aceh.

2. Untuk mengetahui Berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berangkat dari uraian latar belakang serta perumusan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan rujukan akademik maupun sumber masukan dalam pengembangan keilmuan di bidang ekonomi. Selain itu, kajian ini memperkaya literatur ekonomi, khususnya dalam menelaah keterkaitan antara laju pertumbuhan perekonomian, alokasi belanja pemerintah, serta kemampuan penyerapan tenaga kerja di wilayah Provinsi Aceh.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis pertumbuhan ekonomi dan kebijakan belanja pemerintah dalam mendorong peningkatan kesempatan kerja. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika kebijakan ekonomi serta implikasinya terhadap kondisi

kesejahteraan sosial dan ekonomi.

3. Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan dan mengoptimalkan kebijakan fiskal, khususnya yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap perluasan lapangan kerja. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan di Provinsi Aceh.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan kerangka penyusunan karya ilmiah yang berfungsi untuk mengarahkan alur penelitian agar tersusun secara logis dan sistematis. Dengan adanya sistematika yang jelas, pembahasan penelitian menjadi lebih runtut sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan tujuan penelitian secara menyeluruh. Adapun susunan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan memuat uraian awal penelitian yang mencakup alasan dan dasar dilakukannya penelitian, perumusan permasalahan yang akan dikaji, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta penjelasan mengenai sistematika

penulisan sebagai gambaran umum isi setiap bab.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi kajian teoritis yang bersumber dari berbagai referensi ilmiah, seperti buku, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan pada bab ini bertujuan untuk memperkuat dasar pemikiran peneliti, sekaligus membangun kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti sesuai dengan fokus penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian metodologi dijelaskan secara rinci pendekatan dan rancangan penelitian yang digunakan. Uraian dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber serta jenis data yang dikumpulkan, teknik penentuan sampel, penjelasan operasional setiap variabel penelitian, hingga metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu, dijelaskan pula gambaran umum objek atau subjek penelitian, pemaparan temuan penelitian, serta pembahasan yang mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

## **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup berisi rangkuman hasil penelitian yang dirumuskan dalam bentuk kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait maupun peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan penelitian di masa mendatang.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penyerapan Tenaga Kerja**

Ketenagakerjaan berakar dari konsep tenaga kerja, yang secara yuridis dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa tenaga kerja mencakup setiap individu yang memiliki kemampuan fisik maupun mental untuk melakukan suatu aktivitas kerja dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kebutuhan masyarakat luas. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan dimensi sosial serta aktivitas ekonomi. Keberadaan kesempatan kerja yang memadai menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas daya serap tenaga kerja. Permasalahan yang muncul dalam bidang ketenagakerjaan tidak hanya berkuat pada keterbatasan lapangan pekerjaan atau rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Oleh karena itu, upaya penanganan persoalan ketenagakerjaan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu agar solusi yang dihasilkan mampu menjawab akar permasalahan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori ekonomi klasik, Adam Smith melalui gagasan *Labor Theory of Value* mengemukakan bahwa nilai suatu komoditas ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses produksinya. Semakin besar kontribusi tenaga kerja yang terlibat, maka semakin tinggi pula nilai ekonomi barang yang dihasilkan. Sejalan dengan pandangan tersebut, penyerapan tenaga kerja dapat dimaknai sebagai jumlah individu yang terserap dan bekerja pada suatu unit usaha atau sektor ekonomi tertentu. Tingkat penyerapan ini menjadi faktor krusial dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional, karena berkaitan erat dengan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Penyediaan lapangan pekerjaan yang seimbang dengan pertumbuhan pencari kerja menjadi kunci untuk mencegah terjadinya pengangguran. Selain itu, teori Lewis menjelaskan adanya surplus tenaga kerja di sektor tradisional, khususnya di wilayah pedesaan atau sektor pertanian, yang memungkinkan pemindahan sebagian tenaga kerja ke sektor industri tanpa menurunkan total produksi pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi struktural tenaga kerja dapat menjadi strategi penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lewis mengemukakan pandangan bahwa pada sistem ekonomi yang masih bersifat tradisional, tambahan satu orang tenaga kerja tidak memberikan peningkatan hasil produksi karena nilai produktivitas marginalnya berada pada titik nol. Dengan

kondisi tersebut, pengalihan atau pengurangan tenaga kerja dari sektor tradisional tidak menimbulkan konsekuensi berupa penurunan output yang dihasilkan. Argumentasi ini sejalan dengan dinamika struktural perekonomian, di mana pergeseran aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa peran sektor di luar pertanian memberikan dorongan pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan sektor pertanian. Dalam konteks Indonesia, perkembangan sektor non-pertanian terbukti menyumbang laju pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan melampaui kontribusi sektor agraris, sehingga mendorong terjadinya perpindahan tenaga kerja antarsektor tanpa mengganggu kapasitas produksi nasional.

Daya serap tenaga kerja dalam suatu perekonomian sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan skala usaha yang dijalankan oleh perusahaan, karena semakin besar kapasitas usaha, semakin tinggi pula kebutuhan tenaga kerja yang muncul. Selain itu, besaran upah atau gaji yang berlaku ditentukan oleh mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut pekerja. Faktor demografis juga berperan penting, khususnya jumlah penduduk serta komposisi umur, sebab dominasi kelompok usia anak-anak akan memperkecil proporsi penduduk yang dapat dikategorikan sebagai angkatan kerja. Di samping itu, tingkat penyerapan tenaga kerja turut dipengaruhi oleh intensitas jam kerja, baik dari sisi lamanya waktu kerja dalam

satu minggu maupun proporsi pekerja yang bekerja secara penuh, yang secara keseluruhan mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan struktur ekonomi yang berlaku.

Konsep angkatan kerja dan tenaga kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian ketenagakerjaan secara menyeluruh. Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan penduduk usia kerja sebagai individu yang telah berumur minimal 15 tahun ke atas. Kelompok penduduk usia kerja tersebut selanjutnya dibedakan menjadi dua golongan utama, yaitu mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan mereka yang berada di luar angkatan kerja. Kelompok non-angkatan kerja mencakup individu yang masih mengikuti pendidikan formal, mengelola urusan rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lain yang tidak berorientasi pada kegiatan ekonomi. Sementara itu, angkatan kerja merujuk pada penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan namun belum aktif bekerja secara penuh, maupun mereka yang belum memperoleh pekerjaan dan berada dalam kondisi menganggur sebagaimana dijelaskan oleh Haydarsyah dan Nilasari (2024).

Besarnya tingkat keterlibatan angkatan kerja di suatu wilayah pada periode tertentu sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif. Payaman Simanjuntak (1998) menjelaskan bahwa rasio antara jumlah angkatan kerja dengan total penduduk usia kerja dikenal sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau *Labour Force Participation Rate* (LFPR),

yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana penduduk usia produktif berkontribusi dalam aktivitas ekonomi. Secara makro, tingkat penyerapan tenaga kerja berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai kondisi pasar kerja, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, serta efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dan pengkajian terhadap penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan menjadi krusial guna merancang kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan, sekaligus sebagai upaya strategis dalam menekan angka pengangguran serta mengurangi ketimpangan di pasar tenaga kerja.

### **2.1.1 Indikator Penyerapan Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu unsur krusial yang berperan dalam menentukan dinamika angkatan kerja serta laju pertumbuhan pembangunan di suatu daerah. Tingkat kemampuan suatu wilayah dalam menyerap tenaga kerja mencerminkan kondisi perekonomian, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan, sehingga indikator-indikator penyerapan tenaga kerja digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana tenaga kerja dapat terserap secara optimal dalam kegiatan ekonomi.

#### **1. Kesempatan Kerja**

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan nasional karena

berperan langsung dalam penguatan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Secara umum, arah kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada empat sasaran pokok, yakni pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, pemerataan peluang untuk memperoleh pekerjaan, jaminan perlindungan bagi para pekerja, serta peningkatan taraf hidup tenaga kerja beserta keluarganya. Untuk menilai sejauh mana tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu instrumen pengukuran yang mampu memberikan gambaran objektif mengenai capaian pembangunan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, kesempatan kerja dimaknai sebagai kemampuan sektor usaha maupun lembaga publik dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ideal akan tercapai apabila jumlah posisi kerja yang tercipta sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan dan perluasan lapangan kerja secara merata antarwilayah, dengan mempertimbangkan dinamika kependudukan, pertumbuhan ekonomi, serta strategi negara dalam memperluas peluang kerja (Hapsari & Jalunggono, 2021).

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan di sektor ketenagakerjaan secara menyeluruh. Nilai IPK disusun berdasarkan sembilan komponen utama yang masing-masing diuraikan ke dalam subindikator agar mampu merepresentasikan kondisi nyata

pembangunan ketenagakerjaan. Setiap indikator utama dirancang untuk mencerminkan dimensi tertentu dari keberhasilan kebijakan dan implementasi ketenagakerjaan. Salah satu dimensi penting yang diukur dalam IPK adalah aspek kesempatan kerja, yang berkaitan erat dengan kondisi angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri mencakup penduduk usia produktif, umumnya berusia 15 tahun ke atas, yang telah bekerja, sedang berusaha memperoleh pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari, atau mereka yang secara potensial siap untuk memasuki dunia kerja kapan pun dibutuhkan.

## **2. Perubahan Upah Minimum**

Perubahan upah minimum dapat dipahami sebagai proses penyesuaian nilai upah dasar yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah, dengan tujuan utama menjaga kelayakan hidup tenaga kerja. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas dunia usaha serta dinamika perekonomian yang sedang berlangsung. Upah minimum didefinisikan sebagai nilai terendah upah bulanan yang secara hukum wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, yang di dalamnya mencakup komponen gaji pokok beserta tunjangan yang bersifat tetap. Oleh karena itu, peninjauan ulang terhadap upah minimum dilakukan melalui pertimbangan berbagai indikator makro dan mikro, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kenaikan harga barang dan jasa, produktivitas tenaga kerja,

serta situasi pasar kerja pada wilayah tertentu.

Secara teknis, penetapan besaran upah minimum dilakukan dengan menggunakan formula tertentu, yaitu:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

U<sub>mn</sub> : Upah minimum yang akan ditetapkan

U<sub>mt</sub> : Upah minimum tahun berjalan

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu – September tahun berjalan

ΔPDB<sub>t</sub> : Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

### **3. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja**

#### **a) Permintaan**

Permintaan terhadap tenaga kerja pada dasarnya muncul sebagai konsekuensi dari kebutuhan produsen akan faktor-faktor produksi yang mendukung kegiatan usaha. Tenaga kerja dipandang sebagai salah satu unsur penting yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan barang maupun jasa yang nantinya ditawarkan ke pasar. Produsen merekrut dan memanfaatkan tenaga kerja bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai proses produksi yang efektif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Oleh karena

itu, keputusan untuk mempekerjakan pekerja selalu berkaitan erat dengan rencana produksi serta strategi perusahaan dalam merespons dinamika pasar.

Ketika kebutuhan konsumen terhadap suatu produk atau layanan mengalami peningkatan, pelaku usaha akan cenderung menyesuaikan kapasitas produksinya agar mampu memenuhi permintaan tersebut. Penyesuaian ini dilakukan dengan menambah berbagai faktor produksi, termasuk jumlah tenaga kerja, selama keuntungan yang diperoleh dari peningkatan output masih lebih besar dibandingkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, bertambah atau berkurangnya kebutuhan akan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh perubahan permintaan atas barang dan jasa di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan permintaan tidak langsung yang bersumber dari permintaan terhadap hasil produksi atau output yang dihasilkan perusahaan (Santoso, 2023).

b.) Penawaran

Penawaran tenaga kerja pada hakikatnya menggambarkan keterkaitan antara besaran upah yang diterima dengan jumlah individu yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan produksi. Konsep ini menunjukkan bagaimana perubahan tingkat pendapatan yang ditawarkan akan memengaruhi keputusan seseorang untuk memasuki atau bertahan di pasar kerja. Dengan kata lain, penawaran tenaga kerja merefleksikan respons tenaga

kerja terhadap insentif ekonomi yang diberikan oleh pasar, khususnya dalam bentuk imbalan finansial atas jasa yang mereka sediakan. Melalui mekanisme tersebut, dapat dipahami bahwa keputusan bekerja tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pertimbangan rasional mengenai manfaat dan pengorbanan yang harus ditanggung.

Selain dipengaruhi oleh tingkat upah, penawaran tenaga kerja juga ditentukan oleh berbagai faktor struktural dan sosial. Pertumbuhan jumlah penduduk, komposisi usia produktif, serta karakteristik demografis tertentu turut memengaruhi ketersediaan tenaga kerja di suatu wilayah. Di samping itu, luasnya peluang kerja yang tersedia dan kondisi pasar tenaga kerja secara umum berperan dalam mendorong atau menahan partisipasi angkatan kerja. Kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, seperti regulasi upah minimum, program pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja, juga memiliki dampak signifikan terhadap keputusan individu dalam menawarkan kemampuan dan waktu kerjanya ke pasar.

### **2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Sumanto (2022), sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pembangunan perekonomian nasional, karena keberadaannya menjadi penggerak utama dalam aktivitas produksi, distribusi,

maupun jasa. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya terselesaikan, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, serta tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menuntut adanya perhatian dan kebijakan yang lebih serius dari berbagai pihak agar proses pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor penentu yang saling berkaitan dan berperan penting dalam membuka peluang kerja serta meningkatkan kualitas kesempatan kerja bagi masyarakat.

#### 1. Tingkat Pengangguran yang Tinggi

Pengangguran masih menjadi persoalan ketenagakerjaan yang berdampak signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam perspektif makroekonomi, tingginya jumlah penduduk usia kerja yang belum terserap mencerminkan adanya kelemahan struktural pada sistem ekonomi dan mekanisme pasar kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan peluang kerja yang memadai, sehingga diperlukan perumusan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penyesuaian kompetensi tenaga kerja

dengan kebutuhan dunia usaha, serta penguatan sektor-sektor produktif yang berpotensi menyerap tenaga kerja secara luas.

Besarnya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai penyebab yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah laju pertumbuhan penduduk yang melampaui kemampuan penciptaan kesempatan kerja baru, sehingga memunculkan kelebihan pasokan tenaga kerja. Situasi ini semakin diperparah ketika sebagian pencari kerja memiliki keterampilan dan kapasitas yang terbatas, yang menyebabkan mereka sulit bersaing di pasar kerja. Di samping itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil turut memperbesar risiko pengangguran, terutama ketika terjadi perlambatan atau krisis ekonomi yang memaksa perusahaan mengurangi kegiatan usaha hingga menghentikan operasionalnya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketidakharmonisan antara kualifikasi pendidikan pencari kerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia, sehingga tercipta ketimpangan antara permintaan tenaga kerja oleh industri dan kemampuan tenaga kerja yang ada. Kondisi tersebut pada akhirnya memperlebar jurang antara kebutuhan pasar kerja dan daya saing angkatan kerja.

## 2. Meningkatnya Angkatan Kerja

Peningkatan jumlah tenaga kerja berlangsung bersamaan dengan bertambahnya populasi penduduk yang telah mencapai tahap usia produktif sehingga memiliki kesiapan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam dunia ketenagakerjaan. Perkembangan tersebut tidak terjadi secara tiba-

tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masuknya kelompok usia kerja yang sebelumnya belum terlibat secara aktif dalam pasar kerja. Kelompok ini, misalnya para lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai mencari peluang untuk memperoleh pekerjaan dan mengaplikasikan kompetensi yang dimiliki. Lonjakan jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai dapat menimbulkan tekanan ekonomi, bahkan berdampak pada kondisi perusahaan tertentu yang tidak mampu bertahan dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Selain itu, permasalahan ketenagakerjaan juga diperparah oleh adanya ketidakharmonisan antara kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dengan bidang pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Situasi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran sumber daya manusia, sehingga menciptakan kesenjangan struktural dalam pasar tenaga kerja yang sulit diatasi tanpa penyesuaian kebijakan dan peningkatan kualitas kompetensi.

### 3. Mutu Tenaga Kerja yang Rendah

Mayoritas angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh individu dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah, disertai penguasaan keterampilan dan kompetensi kerja yang belum berkembang secara optimal, sehingga banyak di antaranya belum siap bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut mengakibatkan para pencari kerja tidak memiliki

bekal kemampuan teknis maupun pengalaman praktis yang memadai untuk memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia tenaga kerja nasional masih tergolong lemah dan belum mampu mendukung peningkatan produktivitas secara maksimal. Rendahnya kualitas ini berimplikasi langsung pada semakin sempitnya peluang kerja yang dapat diperoleh, karena perusahaan cenderung memilih tenaga kerja dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan juga menyebabkan jenis pekerjaan yang dapat dimasuki menjadi sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun ragam bidang pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja tersebut.

#### 4. Penyebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata

Ketidakterataan penyebaran tenaga kerja di Indonesia merupakan suatu keadaan ketika sumber daya manusia usia kerja lebih banyak terkumpul pada wilayah atau bidang usaha tertentu, sedangkan daerah lain maupun sektor ekonomi yang berbeda justru mengalami keterbatasan jumlah pekerja. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja antardaerah maupun antarbidang pekerjaan, sehingga tidak semua potensi wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain masih tingginya tingkat pengangguran di beberapa wilayah, kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang mendorong

konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat-pusat tertentu, meningkatnya perpindahan penduduk usia produktif ke daerah yang dianggap lebih menjanjikan, serta terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil pada sektor-sektor tertentu yang sebenarnya membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah memadai.

## **2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk terus memperluas kinerja perekonomiannya dalam jangka panjang melalui peningkatan output barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang prosesnya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, penataan kelembagaan, serta penyesuaian nilai dan orientasi ideologis seiring dengan dinamika perubahan sosial dan ekonomi (Munajat, 2023). Sejalan dengan pandangan tersebut, Yanda *et al.* (2022) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas produksi dalam suatu sistem perekonomian, yang tercermin secara nyata melalui kenaikan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Dalam konteks pembangunan, pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan ekonomi secara keseluruhan, sehingga perlu memperoleh perhatian serius baik dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan maupun dari masyarakat sebagai pelaku ekonomi, terutama karena indikator ini sering digunakan untuk

menilai kemajuan suatu negara. Lebih lanjut, Sari (2022) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai salah satu tolok ukur utama keberhasilan pembangunan dan sekaligus menjadi prasyarat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, di mana hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan yang bersifat negatif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai, maka semakin besar pula potensi penurunan jumlah penduduk miskin.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa akselerasi perkembangan perekonomian memegang peranan krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Laju ekonomi biasanya direpresentasikan melalui indikator pendapatan per individu, yang secara teoritis dianggap mampu memacu peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Meskipun demikian, tingkat kemakmuran ekonomi tidak dapat diidentikkan secara sederhana dengan besaran pendapatan rata-rata per orang, sebagaimana ditegaskan oleh Erizal (2024). Kondisi ini terjadi karena nilai pendapatan per kapita yang tinggi dalam suatu struktur ekonomi tidak selalu mencerminkan terpenuhinya kesejahteraan bagi semua warga, khususnya ketika terjadi ketimpangan pembagian pendapatan baik antarwilayah maupun antarkelompok sosial. Atas dasar itu, orientasi pembangunan perlu diarahkan pada perbaikan kesejahteraan secara inklusif agar mutu kehidupan seluruh lapisan masyarakat dapat

meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi serta keberlanjutan pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Erizal, 2024).

Secara empiris dapat dipahami bahwa kemajuan kesejahteraan memiliki keterkaitan yang erat dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, karena meningkatnya kesejahteraan biasanya diikuti oleh terpenuhinya kebutuhan dasar, akses layanan publik yang lebih baik, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, ketika laju pertumbuhan ekonomi tidak mampu bergerak secara positif, aktivitas perekonomian cenderung berada pada kondisi mandek atau tidak berkembang, sehingga daya dorong terhadap peningkatan pendapatan dan produktivitas menjadi terbatas. Situasi tersebut dalam jangka panjang berimplikasi pada berkurangnya kapasitas negara untuk mengelola sumber daya dan membiayai program pembangunan sosial, yang pada akhirnya menyulitkan pemerintah dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan yang layak dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli**

Menurut Munajat (2023) teori pertumbuhan ekonomi mengkaji berbagai komponen yang berperan dalam mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu negara. Teori ini juga menelaah hubungan timbal balik antar unsur tersebut sehingga dapat menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan ekonomi

berlangsung secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

## 1. Teori Klasik

### a.) Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Adam Smith

Pandangan Adam Smith mengenai pertumbuhan ekonomi menekankan adanya dua aspek utama, yakni peningkatan jumlah hasil produksi secara keseluruhan dan perkembangan jumlah penduduk. Kenaikan output nasional tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental. Faktor-faktor tersebut meliputi ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, jumlah tenaga kerja yang berasal dari populasi penduduk, serta akumulasi modal yang digunakan dalam kegiatan produksi. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan bersama-sama menentukan kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar.

### b.) Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut David Ricardo

Menurut David Ricardo, dinamika pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan perubahan jumlah penduduk. Peningkatan populasi dipandang sebagai faktor penting karena dapat memperluas ketersediaan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu, penambahan penduduk juga berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, sehingga dapat memengaruhi kapasitas produksi dan perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, jumlah penduduk memiliki peran strategis dalam mendorong atau

membatasi laju pertumbuhan ekonomi.

## 2. Teori Pertumbuhan Baru

Teori Pertumbuhan Baru berpandangan bahwa peningkatan kinerja perekonomian dalam jangka panjang tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal, melainkan sangat bergantung pada kemajuan teknologi yang berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Teknologi dalam teori ini bersifat endogen, artinya berkembang melalui aktivitas ekonomi, seperti penelitian, inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, investasi pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pengetahuan dianggap sebagai faktor kunci yang mampu mendorong produktivitas dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara global.

## 3. Teori Harrod–Domar

Teori Harrod Domar mengkaji keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi dalam suatu perekonomian. Inti pemikirannya menyatakan bahwa pada suatu periode tertentu, tingkat pendapatan nasional mungkin cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia dengan tingkat upah tertentu. Namun, pada periode berikutnya, kondisi tersebut tidak lagi memadai untuk menampung seluruh angkatan kerja. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan kapasitas produksi yang dihasilkan dari investasi sebelumnya, yang baru dapat dimanfaatkan pada periode selanjutnya. Oleh karena itu,

Harrod–Domar menegaskan bahwa cara utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan tabungan dan investasi, karena semakin besar investasi yang dilakukan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.

#### 4. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori Pertumbuhan Neoklasik, yang dikenal melalui model Solow–Swan, menjelaskan proses tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang melalui tiga faktor utama. Faktor tersebut meliputi tenaga kerja, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya yang meningkat melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan; akumulasi modal yang berasal dari kegiatan menabung dan investasi; serta kemajuan teknologi. Dalam kerangka ini, teknologi berperan sebagai faktor eksternal yang menentukan efisiensi produksi. Model Solow–Swan menunjukkan bahwa keseimbangan pertumbuhan ekonomi akan tercapai ketika ketiga faktor tersebut berkembang secara proporsional.

#### 5. Teori Schumpeter

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Usman (2023), teori Schumpeter menempatkan inovasi sebagai pendorong utama dinamika pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan peran penting pengusaha dalam menciptakan pembaruan melalui ide-ide baru, metode produksi yang berbeda, serta pengembangan produk dan pasar. Kemajuan teknologi

dalam perspektif ini sangat dipengaruhi oleh semangat kewirausahaan yang tumbuh di masyarakat, khususnya kemampuan individu untuk mengenali peluang, mengambil risiko, mendirikan usaha baru, maupun memperluas skala usaha yang telah berjalan.

### **2.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Liana dan Damanik (2024), pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai gambaran perkembangan perekonomian suatu wilayah yang tercermin melalui sejumlah indikator utama. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana aktivitas ekonomi mengalami peningkatan serta perubahan kualitas pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Produk Domestik Bruto (PDB)**

Produk Domestik Bruto merupakan ukuran fundamental dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara. Indikator ini merepresentasikan akumulasi nilai tambah dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan selama periode tertentu, baik melalui kegiatan produksi oleh perusahaan lokal maupun oleh entitas asing yang menjalankan usahanya di dalam batas wilayah negara. Dengan demikian, PDB mencerminkan kapasitas produksi total serta dinamika aktivitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

#### **2. Perubahan Struktur Perekonomian pada Masyarakat Berkembang dan Maju**

Pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan

umumnya mendorong terjadinya pergeseran struktur ekonomi. Perubahan tersebut ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara sektor industri menunjukkan peningkatan peran yang signifikan. Industri memiliki posisi strategis karena mampu menciptakan peluang kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor. Oleh sebab itu, arah pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya bergantung pada sektor agraris, tetapi juga perlu difokuskan pada penguatan sektor industri sebagai penggerak utama pertumbuhan.

### 3. PDB per Kapita

PDB per kapita digunakan sebagai alat analisis untuk menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan nilai total PDB dengan jumlah penduduk yang ada. Nilai PDB per kapita sering dimanfaatkan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum serta membandingkan kondisi ekonomi antarwilayah atau antarnegara.

### 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga berhubungan erat dengan kualitas hidup manusia. IPM menjadi instrumen penting dalam menilai kemajuan pembangunan melalui tiga aspek utama, yakni derajat kesehatan, capaian pendidikan, dan tingkat kelayakan

hidup. Dengan menggunakan IPM, pertumbuhan ekonomi dapat dievaluasi secara lebih komprehensif karena tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.

## 5. Urbanisasi

Urbanisasi merujuk pada meningkatnya persentase penduduk yang menetap di kawasan perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Fenomena ini sering kali berkaitan dengan peluang ekonomi yang lebih besar di kota, seperti lapangan pekerjaan dan akses terhadap layanan publik. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila jumlah penduduk di wilayah perkotaan tidak mengalami penambahan, atau tingkat pertumbuhannya berada pada angka nol.

## 6. Indeks Kualitas Hidup (IKH)

Indeks Kualitas Hidup digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara lebih luas. Perhitungan IKH didasarkan pada sejumlah indikator sosial, antara lain rata-rata angka harapan hidup pada usia tertentu, tingkat kematian bayi, serta persentase penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Melalui indeks ini, kualitas kehidupan masyarakat dapat dinilai secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan kesehatan.

### **2.2.3 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Usman (2023), laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah dapat dianalisis dengan menggunakan

besaran Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan bertujuan untuk meniadakan dampak perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu, sehingga nilai pertumbuhan yang diperoleh benar-benar mencerminkan peningkatan volume produksi barang dan jasa, bukan akibat inflasi.

Penghitungan pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat dilakukan secara terus-menerus atau dalam rentang waktu yang sangat singkat. Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan dan pengolahan data PDB yang relatif kompleks, memerlukan ketelitian tinggi, serta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, pengukuran pertumbuhan ekonomi umumnya dilaksanakan dalam periode tertentu, seperti per tiga bulan (triwulanan) atau satu tahun (tahunan), agar hasil perhitungannya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$G_t = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_t$  : Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

$PDB_t$  : Produk domestik bruto t (berdasarkan harga konstan)

$PDB_{t-1}$  : Produk domestik bruto periode sebelumnya

#### **2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses meningkatnya kemampuan suatu sistem perekonomian dalam menghasilkan output berupa barang maupun layanan dalam jangka waktu tertentu. Sejalan dengan pandangan Purba & Damanik (2024), terdapat sejumlah determinan utama yang berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah besarnya penanaman modal yang dilakukan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Aktivitas investasi tersebut berkontribusi secara langsung terhadap pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, memperbaiki kapasitas produksi, serta membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Selain investasi, tingkat konsumsi rumah tangga juga memiliki peranan yang signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki kemampuan membeli yang kuat dan menunjukkan kecenderungan untuk membelanjakan pendapatannya pada berbagai kebutuhan barang dan jasa, maka permintaan agregat akan mengalami peningkatan. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk memperluas kapasitas produksi, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.

Di samping kedua faktor tersebut, aspek lain seperti kemajuan teknologi, kondisi politik yang kondusif, serta perumusan kebijakan ekonomi yang tepat turut memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi proses produksi dan efektivitas kerja, sementara stabilitas politik serta kebijakan ekonomi yang konsisten mampu menciptakan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan investasi maupun menjalankan kegiatan usaha. Dengan demikian, kombinasi dari berbagai faktor tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **2.3 Pengeluaran Pemerintah**

Dalam sistem penyelenggaraan negara, otoritas publik menjalankan berbagai aktivitas belanja dan pengadaan sebagai upaya menjaga keberlangsungan fungsi administrasi pemerintahan serta memastikan aktivitas ekonomi nasional dapat berjalan secara berkesinambungan. Belanja negara dapat diartikan sebagai alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah dan secara langsung memperoleh imbalan atas pengeluaran tersebut, misalnya melalui pengadaan barang dan layanan, pembayaran upah aparatur sipil negara, serta kebutuhan operasional lainnya. Aktivitas belanja ini merepresentasikan bentuk pendanaan yang digunakan pemerintah dalam rangka merealisasikan kebijakan dan program yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai bagian

dari strategi pembangunan nasional (Armansyah, 2022).

Pengeluaran konsumtif yang dilakukan oleh pemerintah meliputi biaya untuk pegawai, alokasi penyusutan aset tetap, serta belanja atas kebutuhan barang dan jasa yang bersifat rutin, seperti pengeluaran perjalanan dinas, kegiatan perawatan, dan kebutuhan operasional harian lainnya. Nilai belanja tersebut kemudian disesuaikan dengan mengurangi penerimaan yang diperoleh pemerintah dari kegiatan produksi barang maupun penyediaan jasa. Ruang lingkup pengeluaran konsumsi ini tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat, tetapi juga mencakup anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem fiskal nasional yang terdesentralisasi.

Di samping faktor fiskal, perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh unsur lain, antara lain kemajuan teknologi, kondisi politik yang kondusif, serta penerapan kebijakan ekonomi yang terarah. Perkembangan teknologi berperan dalam meningkatkan tingkat efisiensi serta daya guna proses produksi, sehingga mampu mendorong peningkatan output secara optimal. Sementara itu, stabilitas dalam bidang politik dan konsistensi kebijakan ekonomi memberikan rasa aman serta kepastian bagi para pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi dan mengembangkan kegiatan bisnisnya secara berkelanjutan.

Pengeluaran pemerintah sebagaimana dijelaskan oleh Sitaniapessy (2013) merupakan salah satu instrumen utama

dalam kebijakan fiskal yang digunakan negara untuk mengelola aktivitas perekonomian. Kebijakan ini diwujudkan melalui penetapan besaran pendapatan serta belanja pemerintah dalam periode tertentu, yang secara formal dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada level regional. Melalui kebijakan fiskal tersebut, pemerintah berupaya menjaga kestabilan harga, mengendalikan tingkat produksi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi agar tetap berada pada jalur yang diharapkan. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam mengarahkan kondisi makroekonomi.

Pada praktiknya, belanja pemerintah mencerminkan arah dan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan publik. Setiap keputusan pembelian yang dilakukan negara merepresentasikan biaya yang harus dialokasikan guna merealisasikan kebijakan pembangunan, peningkatan efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Aktivitas seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, serta pengadaan sarana pendidikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas dasar yang berdampak luas. Selain mendukung pelayanan publik, belanja ini juga berperan dalam

mendorong sektor swasta, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi turut dipengaruhi oleh faktor pendukung lain seperti kemajuan teknologi, stabilitas politik, dan kualitas kebijakan ekonomi, karena ketiganya memberikan dorongan produktivitas sekaligus kepastian bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

### **2.3.1 Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat Provinsi**

Menurut Olivia dan Widanta (2023), anggaran belanja pemerintah daerah merupakan suatu rencana keuangan yang disusun dan ditetapkan secara resmi untuk mendukung pembiayaan seluruh pelaksanaan kewenangan pemerintahan di tingkat daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai tugas dan fungsi pemerintahan daerah yang pelaksanaannya tersebar pada seluruh satuan kerja perangkat daerah. Pengelolaan dan penetapan anggaran belanja daerah berada di bawah tanggung jawab kepala daerah sesuai dengan jenjang pemerintahan, yaitu gubernur pada tingkat provinsi serta bupati dan wali kota pada tingkat kabupaten/kota. Dalam praktiknya, belanja pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi, antara lain berdasarkan fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, maupun berdasarkan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari sudut pandang fungsi, belanja pemerintah daerah dibedakan berdasarkan urusan atau tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dasar fungsi yang jelas dan selaras dengan tugas pemerintahan yang dijalankan.
2. Pengelompokan belanja daerah berdasarkan urusan atau tugas pemerintahan selanjutnya dipisahkan sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, belanja daerah yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara dapat dirinci dengan pola yang sejalan dengan klasifikasi fungsi belanja yang digunakan oleh pemerintah pusat.
3. Apabila belanja pemerintah daerah dikelompokkan berdasarkan program dan kegiatan, maka setiap pengeluaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Dari sisi organisasi, belanja pemerintah daerah disusun dan dialokasikan berdasarkan struktur organisasi perangkat daerah yang ada. Dengan demikian, pengeluaran dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi

pemerintahan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

5. Selanjutnya, apabila belanja pemerintah daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran, maka rincian belanja dapat mencakup pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pengadaan barang modal, pembelian barang dan jasa, penyaluran hibah, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang dianggap diperlukan, bantuan keuangan, serta belanja lain-lain yang bersifat tidak terduga guna mengantisipasi kebutuhan mendesak.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimaknai sebagai rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan kemudian disahkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, APBD berfungsi sebagai pedoman resmi dalam mengelola keuangan daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Selain berperan sebagai instrumen perencanaan fiskal, APBD juga menjadi media penyampaian informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai arah kebijakan serta skala prioritas penggunaan anggaran yang telah dirumuskan melalui pembahasan bersama lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara garis besar, struktur APBD tersusun atas tiga unsur pokok, yakni pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan, belanja daerah sebagai bentuk pengeluaran, serta pembiayaan daerah

yang berfungsi menutup selisih antara keduanya.

Belanja daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui penggunaan dana yang telah dianggarkan. Dalam struktur belanja daerah, terdapat empat kelompok utama pengeluaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya. Dari komposisi belanja tersebut, dapat diketahui fokus dan prioritas pembangunan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahap perencanaan APBD, pemerintah daerah dimungkinkan menetapkan kondisi anggaran dalam posisi surplus maupun defisit. Namun, dalam praktik penyusunan dokumen APBD, kondisi defisit anggaran relatif sering dijumpai. Kekurangan anggaran tersebut selanjutnya ditangani melalui mekanisme pembiayaan daerah, yang mencakup dua kategori utama, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

### **2.3.2 Komponen Belanja APBD**

Menurut pandangan Bulqis (2025), pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dimaknai sebagai bentuk penggunaan dana publik yang direncanakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk merealisasikan berbagai agenda pembangunan serta penyediaan layanan kepada masyarakat. Alokasi belanja tersebut disusun

secara sistematis agar setiap program dan kegiatan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara teoritis, pengeluaran APBD terdiri atas beberapa komponen utama yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan jenis pengeluaran yang berhubungan langsung dengan aktivitas rutin pemerintahan daerah. Komponen ini mencakup pembiayaan yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur, mendukung kegiatan operasional perkantoran, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta menutup berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Melalui belanja operasional, keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dapat terjamin secara efektif dan efisien.

### 2. Belanja Pembangunan

Belanja pembangunan adalah alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pengeluaran ini meliputi pembiayaan pembangunan infrastruktur fisik, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan mutu layanan kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Tujuan utama dari belanja pembangunan adalah mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### 3. Belanja Modal

Belanja modal dapat dipahami sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk investasi jangka panjang dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap milik pemerintah daerah. Jenis belanja ini mencakup pembangunan maupun pengadaan fasilitas seperti gedung pemerintahan, jalan, jembatan, serta sarana umum lainnya yang memiliki manfaat dalam jangka waktu panjang. Selain itu, belanja modal juga meliputi pembelian peralatan, mesin, dan barang modal lain yang mendukung peningkatan kapasitas pelayanan publik.

### 4. Transfer ke Daerah dan Desa

Transfer ke daerah dan desa merupakan pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Dana transfer ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kegiatan pembangunan di tingkat lokal. Melalui mekanisme transfer tersebut, diharapkan pemerataan pembangunan dapat tercapai dan kemampuan daerah serta desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dapat semakin diperkuat.

#### **2.3.3 Pembiayaan APBD**

Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dipahami sebagai mekanisme pendanaan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menutupi selisih kekurangan antara total penerimaan dan keseluruhan

pengeluaran yang tercantum dalam APBD. Pembiayaan ini berfungsi sebagai instrumen penyeimbang fiskal agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah tetap dapat berjalan secara optimal meskipun terjadi defisit anggaran. Adapun bentuk-bentuk pembiayaan APBD dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan landasan teori dan referensi yang relevan.

#### 1. Pembiayaan yang Bersumber dari Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan muncul ketika pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber-sumber tertentu yang tidak digolongkan sebagai pendapatan reguler daerah. Sumber tersebut antara lain berasal dari hasil penjualan aset daerah, penerimaan pinjaman, maupun bentuk penerimaan lain yang bersifat insidental. Dana yang diperoleh melalui skema ini dimanfaatkan secara khusus untuk menutup kekurangan anggaran yang terjadi dalam pelaksanaan APBD pada tahun berjalan.

#### 2. Pembiayaan yang Berasal dari Utang Daerah

Pembiayaan melalui utang terjadi apabila pemerintah daerah melakukan peminjaman dana kepada pihak eksternal, seperti lembaga perbankan atau institusi keuangan lainnya. Langkah ini ditempuh sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendanaan ketika pendapatan daerah tidak mencukupi. Utang daerah dapat berbentuk pinjaman dengan jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, yang pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### 3. Pembiayaan yang Memanfaatkan Sisa Anggaran Tahun Lalu

Pembiayaan jenis ini dilakukan dengan cara menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran sebelumnya. Dana yang belum terpakai tersebut kemudian dialokasikan kembali untuk menutup kekurangan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya. Pemanfaatan saldo anggaran ini mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya.

### 4. Pembiayaan Melalui Penggunaan Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang telah disiapkan dan disisihkan oleh pemerintah daerah dalam APBD untuk tujuan tertentu. Pembiayaan melalui dana cadangan dilakukan dengan memanfaatkan alokasi tersebut guna menanggulangi defisit anggaran. Penggunaan dana cadangan biasanya dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan kebutuhan strategis daerah.

#### **2.3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat Kabupaten/Kota**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan secara resmi melalui peraturan daerah. APBD Kabupaten/Kota menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam pelaksanaannya, APBD Kabupaten/Kota mencakup berbagai jenis pengeluaran, antara lain belanja daerah serta penyaluran bagi hasil pendapatan kepada desa atau kelurahan.

Bagi hasil tersebut meliputi pembagian hasil pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber pendapatan lain yang dialokasikan untuk desa atau kelurahan. Selain itu, APBD juga memuat pos pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, serta pemberian pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah pusat, maupun kepala daerah otonom lainnya (Sadat, 2022).

### **2.3.5 Teori Pengeluaran Pemerintah**

#### **1. Teori Keynesian**

Pandangan Keynesian pada awalnya menegaskan bahwa belanja negara memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, khususnya ketika tingkat pengangguran masih berada pada level yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, peningkatan pengeluaran publik diyakini mampu memperluas permintaan agregat tanpa langsung memicu tekanan inflasi. Namun, asumsi ini dinilai sudah kurang relevan untuk menggambarkan kondisi perekonomian saat ini, mengingat dinamika ekonomi yang semakin kompleks (Hodijah, Hastuti, Hardiani, & Nurjanah, 2024). Meskipun demikian, belanja pemerintah tetap dipahami sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat mendorong peningkatan pendapatan nasional serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

## 2. Teori Musgrave

Musgrave mengembangkan gagasan pembangunan yang sebelumnya diperkenalkan oleh Rostow dengan menekankan peran negara pada setiap tahap perkembangan ekonomi. Pada fase awal pembangunan, pengeluaran pemerintah difokuskan terutama pada pembiayaan investasi infrastruktur dasar yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya tingkat kemajuan ekonomi dan perubahan struktur masyarakat, peran belanja pemerintah tidak lagi terbatas pada investasi fisik semata. Pemerintah juga dituntut untuk menangani berbagai bentuk kegagalan pasar yang muncul, seperti pengendalian pencemaran lingkungan, penanggulangan praktik monopoli dalam sektor industri, serta upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Lebih lanjut, teori Musgrave menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi, proporsi investasi swasta terhadap Produk Nasional Bruto (PNB) cenderung meningkat, sementara kontribusi investasi pemerintah terhadap PNB secara relatif akan mengalami penurunan (Amin, Wahyunadi, & Baehaqi, 2024)

## 3. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner mengemukakan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita dalam suatu negara akan diikuti oleh peningkatan belanja pemerintah secara relatif. Hal ini terjadi karena semakin kompleksnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menuntut peran negara yang lebih besar, khususnya

dalam mengatur berbagai aspek kehidupan publik. Pemerintah perlu menyediakan regulasi dan layanan di bidang hukum, pendidikan, kebudayaan, serta sektor-sektor lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan Hukum Wagner, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan peningkatan pengeluaran negara, antara lain bertambahnya kebutuhan akan fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, meluasnya tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berkembangnya peran negara di sektor perbankan, serta meningkatnya pembiayaan untuk kegiatan pembangunan (Rahayu S. E., 2023).

## **2.4 Keterkaitan Antar Variabel**

### **2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja merupakan dua indikator makroekonomi yang saling berkaitan erat, karena keduanya menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi sekaligus kemampuan suatu wilayah atau negara dalam menyediakan kesempatan kerja bagi penduduknya. Dalam kajian ekonomi pembangunan, peningkatan pertumbuhan ekonomi umumnya diartikan sebagai bertambahnya nilai produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut mendorong dunia usaha untuk memperluas skala kegiatan produksinya sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja cenderung meningkat guna memenuhi permintaan pasar yang semakin besar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpotensi menciptakan peluang kerja

baru dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran. Meskipun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tidak selalu bersifat otomatis maupun sebanding. Pada sejumlah kondisi, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor padat modal atau didukung oleh kemajuan teknologi modern justru lebih menekankan peningkatan efisiensi dan produktivitas, tanpa diikuti oleh penambahan tenaga kerja yang berarti. Situasi tersebut memunculkan fenomena yang dikenal sebagai *jobless growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja (Julyandi, 2022).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Saleh dan Yanda (2022) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Sulawesi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi justru berkorelasi dengan penurunan persentase tenaga kerja yang terserap secara signifikan. Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Sabihi (2021) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya pada sektor-sektor ekonomi tertentu, mampu mendorong

peningkatan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Damanik (2024) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Samosir, yang menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi di daerah tersebut berkontribusi dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

#### **2.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah merupakan instrumen strategis dalam memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, karena melalui kebijakan fiskal pemerintah memiliki kewenangan untuk menggerakkan perekonomian serta memperluas kesempatan kerja. Peningkatan belanja negara, baik yang bersifat investasi seperti pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun pengeluaran operasional seperti pembayaran upah aparatur negara, bantuan sosial, dan subsidi, dapat mendorong meningkatnya permintaan agregat dalam sistem perekonomian. Alokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat padat karya, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum, secara langsung mampu menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat lokal yang bekerja pada sektor konstruksi serta layanan pendukung lainnya. Di samping dampak langsung tersebut, belanja pemerintah juga memberikan pengaruh tidak langsung melalui peningkatan pendapatan dan daya beli

masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menambah jumlah pekerja. Meskipun demikian, kemampuan pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja sangat ditentukan oleh struktur anggaran dan tingkat efektivitas penggunaannya. Apabila belanja lebih banyak diarahkan pada sektor yang bersifat padat modal atau hanya bersifat konsumtif tanpa memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas jangka panjang, maka pengaruhnya terhadap penciptaan lapangan kerja cenderung terbatas (Juardi & Jurais, 2021).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asmara dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki pengaruh yang bersifat negatif serta tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan besaran pengeluaran pemerintah belum diarahkan secara optimal pada sektor-sektor yang secara langsung berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti program pelatihan kerja, pengembangan keterampilan, maupun pembiayaan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Akibatnya, alokasi anggaran yang tersebar di berbagai sektor tersebut tidak memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rompas (2024), yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh signifikan

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan adanya perbedaan efektivitas pengelolaan dan fokus anggaran antar wilayah.

## 2.5 Penelitian Terkait

Berdasarkan paparan diatas untuk mendukung penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terkait mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh yang telah di teliti sebelumnya.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Fikri Rostina & Srinita (2024) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh”	Pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan data panel periode 2018–2022	Pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan tingkat pendidikan memberikan pengaruh positif yang signifikan	Sama-sama mengkaji Provinsi Aceh serta variabel pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja	Tidak memasukkan variabel pengeluaran pemerintah
2	Elidawaty Purba & Darwin Damanik	Metode kuantitatif dengan regresi	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif	Sama-sama meneliti hubungan	Hanya menggunakan satu variabel

	(2024) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Samosir”	linear sederhana berbasis data sekunder tahun 2009–2022	dan signifikan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Samosir	pertumbuh an ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja	independen dan lokasi penelitian berbeda
3	Bemby Agung Pratama, Sri Muljaningsih & Kiki Asmara (2021) “Pengaruh PDRB, Tingkat Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo”	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda	PDRB berpengaru h positif signifikan, sementara pengeluaran pemerintah berpengaru h negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja	Sama- sama menganalisis pengeluara n pemerintah dan pertumbuh an ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja	Lokasi dan periode penelitian berbeda
4	Wensy F. I. Rompas (2024) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara”	Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif	Pertumbuh an ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaru h signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja	Sama- sama meneliti pertumbuh an ekonomi dan pengeluara n pemerintah terhadap tenaga kerja	Objek penelitian berbeda serta penambah an variabel investasi

5	Yolanda S. Olivia & A.A.B.P. Widanta (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”	Metode kuantitatif dengan regresi linear berganda	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan	Sama-sama mengkaji pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah	Wilayah penelitian berbeda dan menambahkan variabel upah minimum
6	Nia Larasati & Yuni Prihadi Utomo (2023) “Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001–2020”	Pendekatan kuantitatif dengan uji kausalitas Granger	Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausal satu arah terhadap penyerapan tenaga kerja	Sama-sama meneliti keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja	Tidak meneliti pengeluaran pemerintah dan fokus pada kausalitas
7	Rasyidah Bulqis (2025) “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan	Metode kuantitatif dengan pendekatan <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan, sedangkan upah minimum dan investasi	Sama-sama meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja	Tidak menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan memakai perspektif ekonomi Islam

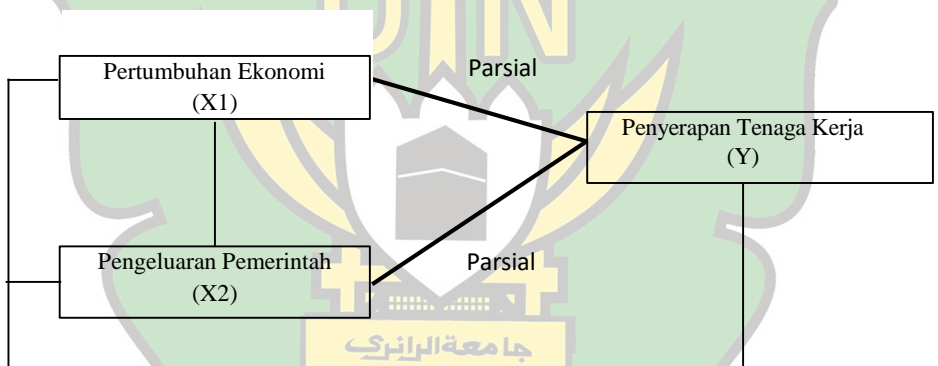
	Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam”		tidak signifikan		
8	Azizul Lukmanul Hakim, Fadli Faturrahman & Ade Kalis Tangariano (2023) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017–2020”	Penelitian kuantitatif dengan regresi data panel model <i>Random Effect</i>	PDRB, IPM, dan investasi berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan UMP berpengaruh positif signifikan	Sama-sama menjadi variabel dependen	Tidak meneliti pengeluaran pemerintah serta wilayah penelitian berbeda
9	Aria Wiraja & Marwan (2023) “Inflasi, Upah Minimum Regional, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Daya Serap Tenaga Kerja”	Pendekatan kuantitatif dengan data panel periode 2016–2020	Inflasi dan UMR berpengaruh negatif, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan	Sama-sama meneliti pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja	Tidak memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi dan menambahkan inflasi
10	Alam Reza Berlian & Nugroho Sumarjiyanto (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, UMKM, dan	Metode kuantitatif dengan analisis data panel melalui uji Chow dan Hausman	Pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan	Sama-sama meneliti pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran	Fokus pada kemiskinan sebagai variabel antara, bukan langsung penyerapan tenaga kerja

Tingkat Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”		pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan	n pemerintah	
--	--	---	--------------	--

Sumber: Data diolah (2025)

## 2.5 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berpikir**



Sumber: Data Diolah (2025)

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari kerangka berpikir diatas maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

Ho1 : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

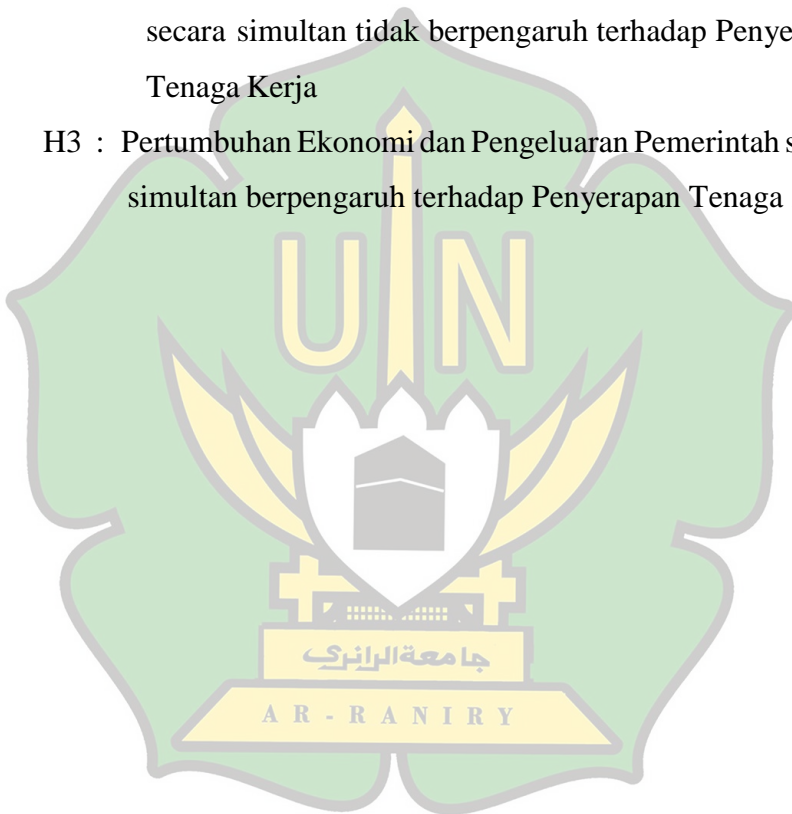
H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Ho2 : Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

H2 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Ho3 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

H3 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama dalam proses pengkajian. Pendekatan kuantitatif merupakan bentuk penelitian yang menitikberatkan pada penarikan simpulan secara inferensial, yaitu simpulan yang diperoleh melalui pengujian hipotesis dengan teknik analisis statistik. Proses tersebut dilakukan berdasarkan data empiris yang dikumpulkan melalui prosedur pengukuran yang sistematis dan terstruktur (Djaali, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan bersifat objektif, terukur, serta dapat digeneralisasikan.

Selain itu, penelitian kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini termasuk ke dalam kategori penelitian asosiatif. Purnasari (2021) menjelaskan bahwa penelitian asosiatif bertujuan untuk menganalisis serta menguji dugaan adanya keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Penelitian jenis ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, pengaruh, maupun hubungan sebab dan akibat yang terjadi antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak

langsung dari sumber utama, melainkan berasal dari lembaga atau instansi resmi yang telah melakukan pengolahan data sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data panel, yakni kombinasi antara data lintas wilayah dan data runtut waktu. Adapun variabel yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, serta tingkat penyerapan tenaga kerja. Data mengenai pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, informasi terkait pengeluaran pemerintah bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Penggunaan data dari lembaga resmi tersebut diharapkan dapat menjamin validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam analisis.

### **3.3 Sampel Penelitian**

Sampel dapat diartikan sebagai sebagian unsur yang mewakili keseluruhan populasi yang menjadi objek penelitian (Djaali, 2020). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan berupa data publikasi resmi yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut mencakup periode waktu selama tujuh tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga 2024. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi 23 kabupaten dan kota yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Data lintas wilayah (*cross section*) diambil dari seluruh kabupaten/kota tersebut, sedangkan data runtut waktu (*time series*) diperoleh berdasarkan periode pengamatan tahun 2018 sampai dengan 2024. Kombinasi kedua

jenis data tersebut memungkinkan peneliti untuk menganalisis dinamika perubahan antarwilayah sekaligus perkembangan variabel penelitian dari waktu ke waktu.

### **3.4 Variabel Penelitian**

Penelitian ini melibatkan dua kelompok variabel utama, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas merupakan faktor yang diduga memengaruhi perubahan pada variabel lainnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang menjadi objek pengaruh tersebut. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai variabel bebas adalah pertumbuhan ekonomi yang diberi simbol (X1) serta pengeluaran pemerintah yang dilambangkan dengan (X2). Sementara itu, variabel terikat yang dianalisis adalah tingkat penyerapan tenaga kerja yang dinyatakan dengan simbol (Y).

### **3.5 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel disusun dengan tujuan memberikan penjelasan yang jelas dan terukur mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, baik yang bersifat dependen maupun independen. Pendefinisian ini penting agar setiap variabel dapat diukur secara konsisten berdasarkan sumber data dan satuan yang digunakan. Adapun penjabaran definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Sumber Data	Satuan
Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	<p>Penyerapan tenaga kerja menggambarkan jumlah individu yang terserap dan aktif bekerja dalam kegiatan ekonomi.</p> <p>Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi melalui kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat</p>	Badan Pusat Statistik	Ribu Jiwa (orang)
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan barang dan jasa secara riil.</p> <p>Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi di proksikan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Aceh. Penggunaan PDRB sebagai proksi dilakukan karena data laju pertumbuhan ekonomi pada</p>	Badan Pusat Statistik	Ribu Rupiah

	periode penelitian memiliki nilai negatif pada tahun tertentu.		
Pengeluaran Pemerintah (X2)	Pengeluaran pemerintah mencakup seluruh alokasi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan fungsi pelayanan publik dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam mendukung pembangunan	DJPK	Miliar Rupiah

Sumber: Data Diolah (2025)

### 3.6 Model Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan *panel least square*. Data panel merupakan kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data lintas unit (*cross section*), sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika antar waktu dan antar wilayah. Model empiris yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogPE}_{it} + \beta_2 \text{LogPP}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi

PP = Pengeluaran Pemerintah

Log = Logaritma

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien regresi pada setiap variabel bebas  
(*independent*)

$e$  = *Error term*

$i$  = *cross section*

$t$  = *time series*

### 3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel yang diolah menggunakan perangkat lunak *e-Views*. Dalam penerapan regresi data panel, terdapat tiga pendekatan model estimasi yang umum digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Masing-masing model memiliki asumsi dan karakteristik yang berbeda dalam menangkap variasi data.

#### a) *Common Effect Model* (CEM)

*Common Effect Model* merupakan pendekatan paling sederhana dalam analisis data panel. Model ini menggabungkan data lintas waktu dan lintas individu tanpa memperhitungkan adanya perbedaan karakteristik antar unit maupun antar periode. Dengan asumsi bahwa seluruh data bersifat homogen, estimasi parameter dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Pendekatan ini dikenal sebagai *Common Effect Estimation* (Wijaya & Suprayitno, 2024). Secara matematis,

model CEM dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1\mathbf{LogPE}_{it} + \beta_2\mathbf{LogPP}_{it} + \mathbf{e}_{it}$$

Keterangan :

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi

PP = Pengeluaran Pemerintah

Log = Logaritma

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien regresi pada setiap variabel bebas  
(*independent*)

$e$  = *error term*

$i$  = *cross section*

$t$  = *time series*

b) *Fixed Effect Model (FEM)*

*Fixed Effect Model* berasumsi bahwa setiap unit analisis memiliki nilai intersep yang berbeda-beda, namun memiliki kemiringan (*slope*) yang sama antar individu. Perbedaan intersep tersebut mencerminkan karakteristik khusus masing-masing individu yang tidak berubah sepanjang waktu, seperti budaya kerja, sistem manajerial, atau kebijakan internal. Untuk menangkap perbedaan ini, FEM menggunakan variabel dummy, sehingga sering disebut sebagai pendekatan *Least Square Dummy Variable (LSDV)* (Wijaya & Suprayitno, 2024). Model FEM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogPE}_{it} + \beta_2 \text{LogPP}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi

PP = Pengeluaran Pemerintah

Log = Logaritma

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien regresi pada setiap variabel bebas  
(independent)

$e$  = error term

$i$  = cross section

$t$  = time series

c) *Random Effect Model* (REM)

*Random Effect Model* digunakan ketika perbedaan antar individu dianggap sebagai bagian dari komponen galat yang bersifat acak. Model ini mengakomodasi kemungkinan adanya korelasi residual baik antar waktu maupun antar individu. Perbedaan intersep diasumsikan masuk ke dalam komponen error yang terdiri atas error individu, error waktu, dan error gabungan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Square* (GLS) (Wijaya & Suprayitno, 2024). Persamaan REM dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogPE}_{it} + \beta_2 \text{LogPP}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi

PP = Pengeluaran Pemerintah

Log = Logaritma

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien regresi pada setiap variabel bebas (*independent*)

$e$  = *error term*

$i$  = *cross section*

$t$  = *time series*

### 3.8 Pemilihan Model Estimasi

Dalam menentukan model regresi data panel yang paling sesuai, digunakan beberapa tahapan pengujian. Menurut Djaali (2020) terdapat tiga uji utama yang digunakan dalam pemilihan model estimasi, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

#### 1. Uji Chow

Uji Chow digunakan sebagai alat untuk menentukan model estimasi data panel yang paling sesuai antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik F yang dihasilkan dari kedua pendekatan tersebut. Dalam uji ini dirumuskan hipotesis nol yang menyatakan bahwa model *Common Effect* merupakan model yang tepat, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa *Fixed Effect* lebih sesuai digunakan. Keputusan pengujian

didasarkan pada nilai probabilitas, di mana apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima, sedangkan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak.

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk menentukan pilihan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Dasar pertimbangan dalam pengujian ini berkaitan dengan perbedaan karakteristik kedua model, di mana *Fixed Effect Model* menggunakan variabel dummy yang dapat mengurangi derajat kebebasan, sedangkan *Random Effect Model* mensyaratkan tidak adanya pelanggaran asumsi pada komponen galat. Hipotesis nol dalam uji ini menyatakan bahwa model *Random Effect* lebih tepat digunakan, sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa *Fixed Effect* merupakan pilihan yang lebih sesuai. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai probabilitas, yaitu hipotesis nol diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dan ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. $H_0$ .

## 3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* yang diperkenalkan oleh Breusch dan Pagan digunakan untuk menentukan apakah model *Random Effect* lebih layak digunakan dibandingkan *Common Effect Model*. Pengujian ini memanfaatkan informasi dari nilai residual yang diperoleh melalui estimasi panel least square. Hipotesis nol

menyatakan bahwa model *Common Effect* sudah memadai, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa model *Random Effect* lebih tepat. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas, di mana hipotesis nol diterima apabila nilai probabilitas melebihi 0,05 dan ditolak apabila nilai probabilitas berada di bawah 0,05.

### **3.9 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.9.1 Model Analisis Data**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang kuat di antara variabel bebas dalam model regresi. Kondisi multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan hasil estimasi koefisien menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Untuk mendeteksi keberadaan masalah tersebut, digunakan indikator nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai VIF menunjukkan angka lebih dari 10 dan nilai toleransi berada di bawah 0,1 maka model regresi dinyatakan mengalami multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi sama dengan atau lebih besar dari 0,1 maka model dianggap tidak memiliki permasalahan multikolinearitas.

#### **3.9.2 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala

tersebut adalah uji Glejser. Menurut Ghozali (2018), uji ini dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual. Hasil pengujian dinilai berdasarkan tingkat signifikansi, di mana apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas, sedangkan nilai probabilitas signifikan yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### **3.10 Uji Hipotesis**

#### **3.10.1 Uji Parsial (Uji t)**

Uji parsial atau uji t merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dalam suatu model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan asumsi bahwa variabel independen lain yang terdapat dalam model dianggap konstan atau tidak ikut memengaruhi hubungan yang sedang diuji. Dengan demikian, uji t berfungsi untuk mengetahui apakah satu variabel bebas secara spesifik memiliki kontribusi yang bermakna terhadap perubahan variabel dependen (Darma, 2021).

Tahapan pelaksanaan uji t dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t hasil perhitungan regresi dengan nilai t kritis yang diperoleh dari tabel distribusi t pada tingkat signifikansi sebesar 5 persen ( $\alpha = 0,05$ ). Apabila nilai t hitung menunjukkan perbedaan yang cukup besar dibandingkan nilai t tabel, maka keputusan statistik dapat diambil. Penolakan

terhadap hipotesis nol menunjukkan bahwa variabel yang diuji memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat.

Apabila nilai probabilitas (p-value) yang dihasilkan dari uji statistik lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif (H1) dinyatakan diterima. Kondisi ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang diuji terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen dalam model regresi. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H0) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas yang diuji tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

### **3.10.2 Uji Simultan (Uji F)**

Uji simultan atau uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kekuatan kolektif variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen (Djaali, 2020).

Apabila nilai signifikansi F yang diperoleh dari hasil analisis regresi menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H0) dinyatakan ditolak. Keputusan ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sehingga model

regresi dapat dianggap layak digunakan. Namun, jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima. Kondisi ini menandakan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model yang digunakan.

### **3.11 Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen berdasarkan variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Dengan kata lain, koefisien ini menunjukkan tingkat kontribusi variabel bebas dalam menerangkan perubahan yang terjadi pada variabel terikat dalam analisis regresi berganda.

Nilai koefisien determinasi berada pada rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen, yang menandakan hubungan antarvariabel semakin kuat. Sebaliknya, apabila nilai  $R^2$  mendekati 0, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin rendah, sehingga hubungan yang terbentuk cenderung lemah (Ghozali, 2018).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara dinamika pertumbuhan perekonomian daerah dan alokasi belanja pemerintah terhadap kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Aceh. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua variabel utama, yakni laju pertumbuhan ekonomi serta besaran pengeluaran pemerintah daerah. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang dikumpulkan selama kurun waktu tujuh tahun, yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Sumber data berasal dari instansi resmi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sehingga validitas dan reliabilitas data dapat dipertanggungjawabkan. Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri atas 23 wilayah pemerintahan tingkat kabupaten dan kota, yang meliputi 18 kabupaten dan 5 kota. Dengan cakupan waktu dan wilayah tersebut, total keseluruhan unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 161 data.

Provinsi Aceh termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang dianugerahi potensi ekonomi cukup besar, khususnya pada bidang pertanian, yang didukung oleh luas wilayah sekitar 57.956 kilometer persegi. Karakteristik geografis Aceh yang bervariasi, mulai dari kawasan dataran rendah, wilayah pesisir,

hingga daerah pegunungan, memberikan kontribusi terhadap ketersediaan sumber daya alam yang beragam dan melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, tetapi juga mencakup subsektor perkebunan, perikanan, pertambangan, serta sektor pariwisata. Keseluruhan sektor ini memiliki peranan penting dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah sekaligus membuka peluang bagi peningkatan kesempatan kerja. Namun demikian, dari sisi ketenagakerjaan, Aceh masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan yang tidak stabil, yang dipengaruhi oleh fluktuasi kondisi ekonomi, terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan, serta belum maksimalnya kualitas dan pemanfaatan sumber daya manusia. Komposisi angkatan kerja di Aceh sebagian besar berasal dari lulusan pendidikan menengah, sementara kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor justru menuntut kompetensi dan keahlian yang lebih spesifik. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu, proses transformasi struktur ekonomi yang seharusnya bergeser dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier belum berlangsung secara optimal, sehingga kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru masih relatif terbatas.

Kondisi ekonomi daerah serta dinamika ketenagakerjaan di

Provinsi Aceh memperlihatkan adanya kapasitas yang cukup besar untuk dikembangkan secara lebih maksimal guna memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Walaupun masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti rendahnya penguasaan kompetensi tenaga kerja, ketimpangan perkembangan antarbidang usaha, dan perubahan tingkat pengangguran yang belum stabil, keberadaan intervensi kebijakan dari pemerintah serta upaya penguatan sektor-sektor potensial memberikan gambaran masa depan yang cukup menjanjikan bagi peningkatan taraf hidup penduduk. Melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif disertai peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia, Provinsi Aceh memiliki peluang nyata untuk memperbaiki situasi pasar kerja sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang bersifat lebih merata dan inklusif.

#### **4.2 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif pada penelitian ini dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan gambaran awal mengenai pola sebaran data dari setiap variabel yang dianalisis. Melalui pendekatan ini, data kuantitatif yang diperoleh disajikan dalam bentuk ringkasan umum sehingga memudahkan pemahaman terhadap karakteristik data secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran yang ditampilkan melalui statistik deskriptif berperan sebagai informasi pendukung yang membantu menjelaskan kondisi empiris variabel yang diteliti. Berdasarkan

proses pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh nilai-nilai statistik deskriptif yang mencerminkan kondisi variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, serta tingkat penyerapan tenaga kerja.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	<b>Pertumbuhan Ekonomi (Ribu Rupiah)</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)</b>	<b>Penyerapan Tenaga Kerja (Ribu Jiwa)</b>
Mean	2.506.646	1.221,579	102.933,6
Median	2.136.000	1.089,320	86.050,00
Maximum	6.836.400	2.636,890	255.249,00
Minimum	1.360.200	5.345,700	15.409,00
Std. Dev.	1.060.138	4.816,695	60.562,67
Observation	161	161	161

*Sumber: Output Eviews Data Diolah (2025)*

Berdasarkan temuan analisis statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai rerata sebesar 2.506,646 Ribu Rupiah dengan nilai tengah (median) mencapai 2.136,000 Ribu Rupiah. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pergerakan pertumbuhan ekonomi secara umum berada dalam kategori yang cukup stabil sepanjang periode pengamatan. Nilai tertinggi yang tercatat sebesar 6.836,400 Ribu Rupiah menunjukkan adanya fase tertentu di mana aktivitas perekonomian mengalami peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, nilai terendah sebesar 1.360,200 Ribu Rupiah mengindikasikan bahwa pada waktu tertentu terjadi perlambatan

yang cukup tajam hingga menyebabkan kontraksi ekonomi. Sementara itu, besarnya nilai simpangan baku sebesar 1.060.138 Ribu Rupiah menandakan bahwa tingkat penyebaran data pertumbuhan ekonomi antar wilayah relatif sangat besar, artinya angka pertumbuhan ekonomi tidak berkumpul disekitar rata-rata tetapi menyebar cukup jauh.

Pada variabel pengeluaran pemerintah, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata mencapai 1.221,579 miliar rupiah, sementara nilai tengahnya berada pada angka 1.089,320 miliar rupiah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi belanja pemerintah tidak tersebar secara seimbang. Selisih yang relatif besar antara nilai rata-rata dan median mengisyaratkan keberadaan sejumlah periode tertentu dengan pengeluaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode lainnya. Temuan tersebut semakin diperjelas dengan adanya nilai tertinggi yang mencapai 2.636,890 miliar rupiah, sedangkan nilai terendah berada pada angka yang jauh lebih kecil. Tingkat variasi antar periode juga tergolong sangat besar, sebagaimana tercermin dari nilai standar deviasi yang mencapai 4.816.695 miliar rupiah. Angka ini menandakan bahwa fluktuasi pengeluaran pemerintah antar waktu pengamatan berlangsung cukup tajam dan tidak stabil.

Pada variabel penyerapan tenaga kerja, analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata berada pada kisaran 102.933,6 ribu jiwa, dengan nilai median sebesar 86.050 ribu

jiwa. Perbedaan antara kedua ukuran pemusatan tersebut menunjukkan adanya ketidaksamaan tingkat penyerapan tenaga kerja baik antar wilayah maupun antar periode waktu. Kondisi ketimpangan ini juga terlihat dari nilai maksimum yang mencapai 255.249 ribu jiwa dan nilai minimum sebesar 15.409 ribu jiwa, yang menggambarkan jurang perbedaan penyerapan tenaga kerja yang cukup lebar. Selain itu, tingkat penyebaran data tergolong tinggi, yang dibuktikan dengan nilai standar deviasi sebesar 60.562,67. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami variasi yang cukup besar selama periode pengamatan.

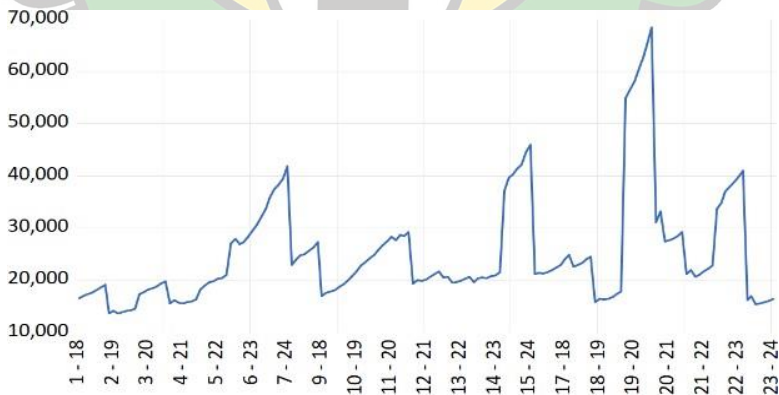
#### **4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai persoalan utama dalam upaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa sekaligus perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Purwanto. et, al. (2025) menjelaskan bahwa dalam praktiknya, dinamika perekonomian tidak selalu berjalan stabil, karena laju pertumbuhan yang ditargetkan dapat mengalami perubahan, baik berupa percepatan maupun perlambatan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam aktivitas ekonomi.

Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi mengacu pada proses berkembangnya kegiatan ekonomi suatu negara atau wilayah yang ditandai dengan bertambahnya output barang dan

jasa yang dihasilkan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pertumbuhan ekonomi umumnya dikaji dalam ruang lingkup makroekonomi dengan perspektif jangka panjang, karena perubahan yang terjadi tidak bersifat instan, melainkan berlangsung secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Peningkatan kemampuan produksi antarperiode tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya faktor-faktor produksi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penanaman modal berperan dalam memperluas ketersediaan barang modal, sementara kemajuan teknologi turut meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam proses produksi (Arizqi & Afida, 2025).

**Grafik 4.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Periode Tahun 2018-2024**



*Sumber: Telah Diolah Kembali Dari BPS (2024)*

Berdasarkan ilustrasi yang disajikan, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi

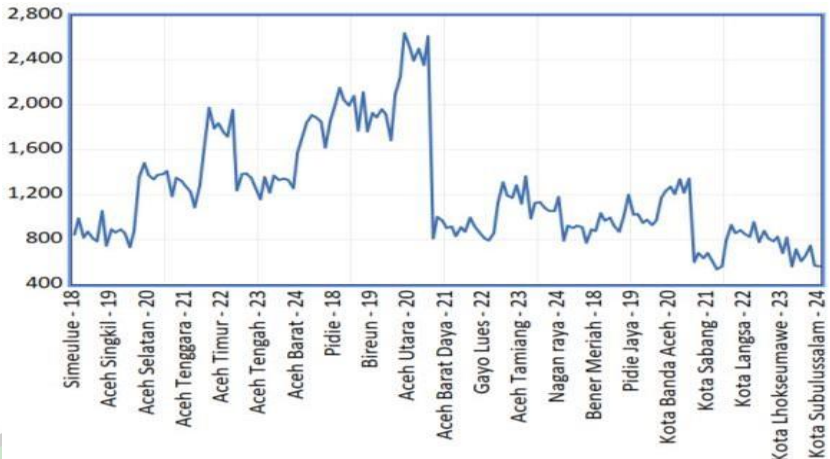
Aceh sepanjang rentang waktu 2018 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang tidak stabil atau naik turun antar tahun. Wilayah dengan capaian pertumbuhan ekonomi paling menonjol selama periode tersebut adalah Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuatnya kontribusi sektor tersier, seperti jasa dan perdagangan, didukung oleh aktivitas industri pengolahan, serta posisi strategis kedua kota tersebut sebagai sentra pemerintahan, pusat pendidikan, dan simpul utama kegiatan perekonomian. Kombinasi faktor tersebut mendorong intensitas aktivitas ekonomi yang lebih tinggi sehingga sirkulasi ekonomi berlangsung lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Sebaliknya, daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif paling rendah adalah Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Jaya. Rendahnya capaian pertumbuhan di kedua kabupaten tersebut berkaitan erat dengan dominasi sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan, yang memiliki nilai tambah terbatas. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembangunan, serta minimnya aliran investasi yang masuk, turut menghambat percepatan aktivitas ekonomi. Akibatnya, perkembangan ekonomi di wilayah tersebut cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan daerah lain di Provinsi Aceh.

#### **4.2.2 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah dapat dipahami sebagai keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai berbagai aktivitas dan kewenangan publik dalam rentang waktu tertentu. Belanja tersebut meliputi seluruh penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan, penyediaan fasilitas umum, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan pengeluaran pemerintah kerap menghadapi sejumlah persoalan, antara lain rendahnya efisiensi dalam penentuan prioritas anggaran, ketidakmerataan pembagian belanja antarbidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, serta perbedaan alokasi antarwilayah. Selain itu, sering dijumpai keterlambatan realisasi anggaran yang menyebabkan program tidak berjalan optimal. Tantangan lain muncul dari tuntutan pemenuhan kebutuhan sosial, seperti penanggulangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, dan penyediaan layanan dasar, yang dalam banyak kasus melampaui kemampuan fiskal negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Olivia & Widanta, 2023).

**Grafik 4.2**  
**Pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh Periode 2018-2024**



*Sumber: Telah Diolah Kembali Dari BPS (2024)*

Berdasarkan interpretasi terhadap grafik tersebut, dapat dijelaskan bahwa belanja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sepanjang rentang waktu 2018 hingga 2024 menunjukkan pola naik dan turun yang tidak seragam antarwilayah, yang menggambarkan perbedaan kemampuan keuangan daerah serta fokus kebijakan pembangunan masing-masing pemerintah daerah. Tingkat pengeluaran terbesar tercatat di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2024, yang berkaitan erat dengan tingginya kebutuhan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta posisinya sebagai salah satu simpul utama aktivitas perekonomian di Provinsi Aceh. Sebaliknya, nilai belanja pemerintah paling rendah ditemukan di Kabupaten Simeulue selama periode 2018–2024, yang dipengaruhi oleh terbatasnya

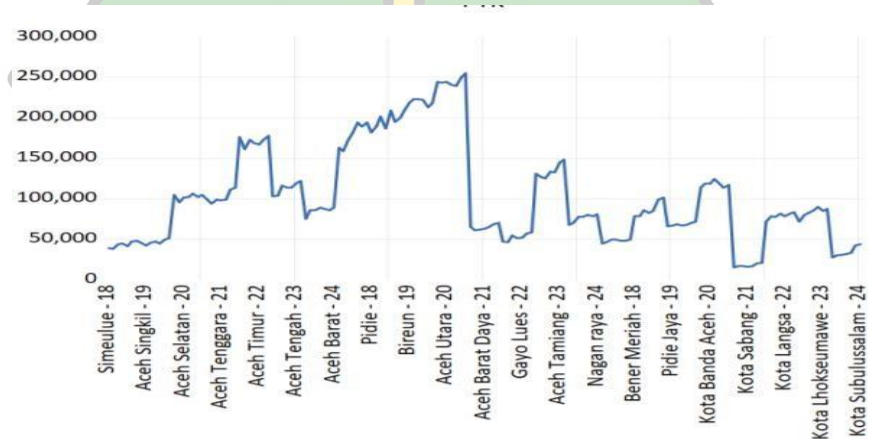
daya fiskal daerah, jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, serta karakteristik wilayah kepulauan yang menyebabkan skala pembangunan dan distribusi anggaran menjadi relatif terbatas. Perbedaan besaran belanja pemerintah antarwilayah ini pada akhirnya berimplikasi pada ketimpangan kemampuan daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi dan menopang laju pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Aceh.

#### **4.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja dapat dipahami sebagai kemampuan suatu sektor ekonomi, dunia usaha, atau unit kerja tertentu dalam menampung individu yang siap bekerja seiring munculnya kebutuhan sumber daya manusia, sehingga mencerminkan keterpaduan antara ketersediaan angkatan kerja dan permintaan pekerjaan. Kondisi ini berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran sekaligus mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat secara luas. Permasalahan utama yang kerap muncul berkaitan dengan ketidakseimbangan antara besarnya potensi tenaga kerja dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, yang antara lain dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, ketidakselarasan keahlian dengan kebutuhan pasar, serta dampak krisis kesehatan global (Dwi Tantra & Apsari Anandari, 2024). Secara konseptual, penyerapan tenaga kerja juga dimaknai sebagai keseluruhan jumlah pekerja yang mampu ditampung oleh berbagai lapangan usaha dalam periode tertentu dan umumnya berkaitan erat dengan aktivitas produksi barang

maupun jasa. Mankiw menjelaskan bahwa konsep ini merujuk pada permintaan tenaga kerja yang direalisasikan dalam suatu unit usaha. Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, meskipun jumlahnya mengalami dinamika akibat pengaruh faktor eksternal, seperti perubahan nilai tukar petani.

**Grafik 4.3**  
**Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Aceh Periode Tahun 2018-2024**



Sumber: Telah Diolah Kembali Dari BPS (2024)

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh selama periode 2018–2024 menunjukkan variasi yang cukup mencolok antar kabupaten dan kota. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk relatif besar serta ditopang oleh kegiatan ekonomi yang berorientasi pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan pada umumnya memperlihatkan kapasitas serapan tenaga kerja yang lebih tinggi

jika dibandingkan dengan daerah perkotaan berskala kecil. Dalam konteks ini, Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai daerah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja paling tinggi, yang didukung oleh luas wilayah, besarnya proporsi penduduk usia produktif, dominasi sektor-sektor padat karya berbasis sumber daya alam, serta keberadaan pusat-pusat aktivitas ekonomi. Sebaliknya, Kota Subulussalam menempati posisi terendah dalam hal penyerapan tenaga kerja, yang dipengaruhi oleh keterbatasan skala perekonomian, jumlah penduduk yang relatif sedikit, serta struktur ekonomi yang belum berkembang secara optimal, sehingga kesempatan kerja yang tersedia masih tergolong terbatas.

#### **4.3 Analisis Penentuan Model Regresi Data Panel**

Secara konseptual, analisis regresi dengan data panel dapat diestimasi menggunakan tiga alternatif pendekatan utama, yakni *Common Effect Model* yang mengasumsikan keseragaman karakteristik antar unit observasi, *Fixed Effect Model* yang memperhitungkan perbedaan individual secara spesifik, serta *Random Effect Model* yang memandang variasi individu sebagai komponen acak. Pemilihan pendekatan yang paling sesuai dalam penelitian ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui serangkaian pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*) yang meliputi uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, uji Hausman untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM, serta uji *Lagrange Multiplier* (LM) guna menilai

kelayakan penggunaan REM dibandingkan CEM. Hasil dari pengujian Chow dan Hausman tersebut selanjutnya dirangkum dan disajikan secara sistematis dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Pemilihan Model Regresi Data Panel**

<i>Chow Test</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section F	112.986246	0.0000
Cross-section Chi-square	476.386501	0.0000
<i>Hausman Test</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section random	121.015291	0.0000

*Sumber: Output Eviews Data Diolah (2025)*

Merujuk pada Tabel 4.2 yang menyajikan hasil tahapan penentuan model regresi data panel, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section F pada uji Chow menunjukkan angka 0,0000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) dinyatakan gugur dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, yang berarti pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dinilai lebih tepat untuk digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Selanjutnya, hasil pengujian Hausman juga memperlihatkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga kembali menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ , yang mengindikasikan bahwa model FEM lebih sesuai dibandingkan dengan *Random Effect Model* (REM). Dengan terpilihnya FEM sebagai model terbaik berdasarkan uji Hausman, maka tahapan pengujian *Lagrange Multiplier* (LM)

tidak lagi diperlukan untuk dilaksanakan, karena pengujian tersebut hanya relevan apabila model REM yang dipilih sebagai alternatif terbaik.

#### **4.4 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan tahapan analitis yang mencakup serangkaian prosedur pengujian statistik yang dilaksanakan pada tahap pra-pemodelan maupun pasca-pembentukan model regresi, baik pada regresi linier sederhana, regresi linier berganda, maupun regresi berbasis data panel. Tujuan utama dari pengujian ini adalah memastikan bahwa model regresi yang dibangun telah memenuhi prasyarat metodologis yang mendasari analisis regresi, sehingga parameter yang dihasilkan dapat diinterpretasikan secara tepat, akurat, serta memiliki tingkat efisiensi yang optimal. Apabila ketentuan-ketentuan dasar tersebut diabaikan atau tidak terpenuhi, maka estimasi koefisien regresi berpotensi mengalami penyimpangan, kehilangan sifat ketidakberpihakan, serta tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penaksir linier terbaik yang tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator* atau *BLUE*).

#### 4.4.1 Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

	<b>PE (X1)</b>	<b>PP (X2)</b>
<b>PE</b>	1.000000	0.050530
<b>PP</b>	0.050530	1.000000

*Sumber: Output Eviews Data Diolah (2025)*

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara pertumbuhan ekonomi (PE) dan pengeluaran pemerintah (PP) berada pada angka 0,050530. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan batas toleransi korelasi sebesar 0,80 yang umumnya digunakan sebagai indikator adanya masalah multikolinearitas. Dengan demikian, hubungan antarvariabel bebas dalam penelitian ini tergolong lemah dan tidak saling berkorelasi secara kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut karena tidak mengandung gejala multikolinearitas, sehingga hasil estimasi model regresi dapat diinterpretasikan secara lebih akurat dan andal.

#### 4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	P-Value
C	0.0000
PE (X <sub>1</sub> )	0.0000
PP (X <sub>2</sub> )	0.0127

*Sumber: Output Eviews Data Diolah (2025)*

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam Tabel 4.4, dapat dijelaskan bahwa nilai *probability* pada variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,0000 menunjukkan angka yang lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel tersebut tidak ditemukan indikasi adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, variabel pengeluaran pemerintah (PP) memiliki nilai *probability* sebesar 0,0127 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga hasil pengujian mengindikasikan bahwa variabel pengeluaran pemerintah mengalami masalah heteroskedastisitas dalam model yang digunakan.

#### 4.5 Model Regresi Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Berdasarkan tahapan analisis regresi data panel yang telah dilakukan, penentuan model estimasi diawali dengan penerapan dua uji pemilihan model, yakni uji Chow dan uji Hausman. Kedua pengujian tersebut bertujuan untuk membandingkan kelayakan beberapa alternatif model sehingga dapat ditetapkan

pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena mampu menangkap perbedaan karakteristik individu secara spesifik dan konsisten sepanjang periode pengamatan. Selanjutnya, proses pengolahan dan estimasi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model menghasilkan temuan empiris yang disajikan secara sistematis pada tabel berikut sebagai dasar interpretasi dan pembahasan lebih lanjut.

**Tabel 4.5**  
***Fixed Effect Model (FEM)***

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.889098	1.163692	5.920037	0.0000
LOG(PE)	0.578360	0.111017	5.209674	0.0000
LOG(PP)	-0.191623	0.075848	-2.526409	0.0127
Root MSE	0.061553	R-squared	0.990509	
Mean dependent var	11.35975	Adjusted R-squared	0.988834	
S.D. dependent var	0.633777	S.E. of regression	0.066972	
Akaike info criterion	-2.427280	Sum squared resid	0.609991	
Schwarz criterion	-1.948801	Log likelihood	220.3960	
Hannan-Quinn criter	-2.232998	F-statistic	591.3656	
Durbin-Watson stat	0.954492	Prob.(F-statistic)	0.000000	

*Sumber: Output Eviews Data Diolah (2025)*

Model regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$\text{LogPTK}_{it} = 6,88 + 0.578\text{LogPE}_{it} - 0.191\text{LogPP}_{it}$$

Keterangan:

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB : Pertumbuhan Ekonomi

PP : Pengeluaran Pemerintah

$\varepsilon$  : Error

Berdasarkan hasil pengolahan data panel yang dianalisis menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.5, maka interpretasi temuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Konstanta

Nilai intersep sebesar 6,889 mengindikasikan bahwa ketika variabel pertumbuhan ekonomi serta belanja pemerintah berada pada kondisi tetap atau diasumsikan tidak mengalami perubahan, tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh selama kurun waktu 2018–2024 masih berada pada angka 6,889. Hal ini menunjukkan adanya tingkat dasar penyerapan tenaga kerja yang tetap eksis meskipun tidak dipengaruhi oleh perubahan kedua variabel independen tersebut.

b) Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (PE) yang bernilai 0,578 menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan aktivitas ekonomi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Secara kuantitatif, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan diikuti oleh peningkatan

penyerapan tenaga kerja sebesar 0,578 persen. Temuan ini menegaskan bahwa ekspansi ekonomi memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong terbentuknya lapangan pekerjaan baru.

c) **Pengeluaran Pemerintah**

Sementara itu, koefisien variabel pengeluaran pemerintah (PP) menunjukkan nilai negatif sebesar -0,191, yang berarti bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah sebesar 1 persen justru berpotensi menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 0,191623 persen. Hasil ini memberikan indikasi bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya diarahkan atau berdampak langsung pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan peluang kerja secara signifikan.

## **4.6 Pengujian Hipotesis**

### **4.6.1 Uji Parsial (Uji T)**

Pengujian statistik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel bebas, yakni laju pertumbuhan perekonomian dan belanja pemerintah, terhadap variabel terikat yang diwakili oleh tingkat penyerapan tenaga kerja. Mengacu pada hasil yang disajikan dalam Tabel 4.5, besaran dampak setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Berdasarkan hasil uji t pada variabel pertumbuhan ekonomi (X1), diperoleh nilai t hitung sebesar 5,209674 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0127. Nilai tersebut lebih kecil

dibandingkan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05, sehingga keputusan statistik yang diambil adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh selama periode pengamatan tahun 2018 hingga 2024. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap.

b) Hasil pengujian  $t$  terhadap variabel pengeluaran pemerintah ( $X_2$ ) menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar -2,526409 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut berada di bawah batas signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan namun bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh pada periode 2018–2024. Koefisien regresi yang bernilai negatif mengisyaratkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah justru cenderung berkorelasi dengan penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja.

#### **4.6.2 Uji Simultan**

Uji simultan atau yang dikenal sebagai Uji F merupakan salah satu prosedur statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan tujuan melihat apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian ini penting untuk mengetahui kelayakan model regresi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada Tabel 4.5, diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000. Nilai tersebut berada di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan belanja pemerintah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh bersama antarvariabel dapat diterima.

#### **4.7 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Melalui pengujian ini, dapat dilihat persentase kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,988843 atau setara dengan 98,88 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Sementara itu, sisanya sebesar 1,12 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang dimasukkan dalam penelitian ini.

## 4.8 Pembahasan

### 4.8.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan pengujian statistik menggunakan uji  $t$ , diperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) memiliki nilai  $t$ -statistic sebesar 5,209674 dengan tingkat probabilitas yang berada di bawah batas signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) tidak dapat dipertahankan, sementara hipotesis alternatif ( $H_1$ ) dinyatakan diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang bersifat positif sekaligus signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh selama rentang waktu 2018–2024. Tanda koefisien yang bernilai positif mengisyaratkan bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah cenderung diikuti oleh meningkatnya kemampuan wilayah tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi merefleksikan meluasnya kegiatan produksi, bertambahnya realisasi investasi, serta meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong terciptanya peluang kerja baru.

Temuan dalam penelitian ini memiliki kesesuaian dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Herina et al. (2025), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terbukti berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap peningkatan penyerapan

tenaga kerja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula kesempatan kerja yang dapat disediakan. Selain itu, penelitian ini juga selaras dengan studi Sabihi et al. (2021) yang menegaskan adanya hubungan positif dan bermakna secara statistik antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan serapan tenaga kerja, khususnya pada wilayah Kota Manado.

Berbeda dengan temuan dalam penelitian ini, hasil kajian yang dilakukan oleh Purwadinata et al. (2025) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang bermakna secara statistik terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Temuan serupa juga disampaikan dalam penelitian Rahayu et al. (2025) yang mengkaji hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat selama periode 1992–2021. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) dinyatakan diterima. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, salah satunya adalah fenomena migrasi penduduk. Tradisi merantau yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Minangkabau, khususnya pada kelompok laki-laki usia produktif, mendorong banyak individu meninggalkan daerah asalnya ketika memasuki usia dewasa untuk menempuh pendidikan maupun mencari peluang kerja di wilayah lain. Akibatnya, jumlah angkatan kerja yang tersedia di

Provinsi Sumatera Barat tidak dapat terserap secara optimal di wilayah tersebut, karena sebagian tenaga kerja potensial justru berasal atau bekerja di luar daerah, sehingga komposisi tenaga kerja lokal tidak sepenuhnya mencerminkan potensi sumber daya manusia setempat.

#### **4.8.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan pengujian signifikansi secara parsial melalui uji  $t$  pada variabel pengeluaran pemerintah ( $X_2$ ), diperoleh nilai statistik sebesar 5,209674 dengan tingkat probabilitas 0,0000 yang berada di bawah batas signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) dinyatakan tidak berlaku, sementara hipotesis alternatif ( $H_1$ ) dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang bersifat negatif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh selama rentang waktu 2018–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah belum sepenuhnya mampu mendorong penciptaan kesempatan kerja. Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan alokasi anggaran yang lebih difokuskan pada belanja rutin serta sektor-sektor yang bersifat padat modal, yang umumnya memiliki kemampuan terbatas dalam menyerap tenaga kerja. Akibatnya, peningkatan belanja tersebut belum memberikan kontribusi optimal terhadap perluasan lapangan pekerjaan.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Febiaranti dan Utomo (2025) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah tidak selalu diikuti oleh bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Apabila dana pemerintah lebih banyak dialokasikan pada sektor-sektor non-padat karya, seperti aktivitas birokrasi, pembayaran kewajiban utang, atau pemberian subsidi yang tidak secara langsung mendorong penciptaan lapangan kerja baru, maka dampak yang dihasilkan terhadap penyerapan tenaga kerja cenderung rendah, bahkan dapat mengalami penurunan. Namun demikian, hasil tersebut bertolak belakang dengan temuan Tasmilah (2021) yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja formal di 33 provinsi di Indonesia, khususnya melalui pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan investasi domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode atau jenis pengeluaran tertentu, belanja pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap kesempatan kerja. Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil kajian Bulqis (2025) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga menunjukkan adanya variasi dampak pengeluaran pemerintah bergantung pada pola alokasi dan sektor yang menjadi sasaran belanja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan mengenai analisis pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh dengan menggunakan model regresi data panel berupa *Fixed Effect Model* (FEM), maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh.
2. Pengeluaran pemerintah (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh.
3. Pertumbuhan ekonomi (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh (Y). Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting dalam menjelaskan perubahan penyerapan tenaga kerja, meskipun arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel berbeda.

#### **5.2 Saran**

1. Pemerintah Provinsi Aceh disarankan untuk lebih aktif mengarahkan strategi pembangunan ekonomi pada bidang-bidang usaha yang memiliki kemampuan besar dalam

menyerap tenaga kerja, antara lain sektor pertanian, kegiatan industri pengolahan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan fokus tersebut, peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto tidak hanya bersifat statistik, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

2. Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah perlu dilakukan peninjauan secara menyeluruh, khususnya terkait dengan komposisi dan prioritas belanja. Dominasi anggaran untuk kebutuhan rutin sebaiknya dikurangi secara bertahap, sementara porsi belanja modal serta program pembangunan yang bersifat produktif dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja perlu ditingkatkan agar anggaran daerah memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal.
3. Hasil kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi bersama dengan besaran belanja pemerintah memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja apabila dilihat secara bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal di tingkat daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan peluang kerja yang berkesinambungan.
4. Untuk penelitian pada masa mendatang, disarankan agar ruang lingkup analisis diperluas dengan memasukkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi tingkat

penyerapan tenaga kerja, seperti kualitas pendidikan, nilai investasi, kebijakan upah minimum, serta komposisi sektor-sektor ekonomi. Selain itu, penggunaan rentang waktu penelitian yang lebih panjang diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih mendalam, menyeluruh, dan memiliki tingkat ketepatan yang lebih tinggi



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Wahyunadi, & Baehaqi. (2024). *Membangum Kapasitas Fiskal Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arizqi, S., & Afida, R. (2025). Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Dari Berbagai Sektor Penting Sebagai Acuan Untuk Meningkatkan Perkembangan Di Masa Mendatang . *Seminar Nasional Hasil Rset dan Pengabdian Ke-4*, 407-416.
- Armansyah. (2022). *Ekonomi Makro*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran, 2025*. Retrieved from <https://bps.go.id/>: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,76 Persen. Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3.09 Juta Rupiah*. Retrieved from [bps.go.id/: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-76-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-09-juta-rupiah-.html](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-76-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-09-juta-rupiah-.html)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (ribu rupiah), 2020*. Retrieved from [aceh.bps.go.id/](https://aceh.bps.go.id/): <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/T1hBNVYwVjBjMU5oTTA5SFVuWjRVSGhuYUhsV1p6MDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-per->

kapita-atas-dasar-hargakonstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh--ribu-rupiah---2020.html?year=2020

- Berlian, A. R., & Maria, N. S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, UMKM, dan Tingkat Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 12(4), 1-9.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2022). *Peran JKN dalam Akses Layanan Kesehatan Masyarakat Perdesaan*. Retrieved from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>
- Bulqis, R. (2025). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 35-43.
- Daeng GS, A. (2020). *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*. Surabaya: Unitomo Press.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Jakarta: Guepedia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Retrieved from [djpk.kemenkeu.go.id/](https://djpk.kemenkeu.go.id/): <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&ahun=2020&provinsi>
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Erizal. (2024). *Konservasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Padang: CV Azka Pustaka.

- Febiaranti, R. S., & Utomo, Y. P. (2025). Pengaruh Upah Minimum, PDB, Inflasi, Keterbukaan, Invest, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 1995 - 2023. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(3), 3982-3994.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gregory, M. (2003). *Teori Makro Ekonomi (Imam Nurmawan. Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Hakim, A. L., Faturrahman, F., & Tangariano, A. K. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2020. *Jurnal Enterprenuer dan Ekonomi*, 1(1), 24-35.
- Hapsari, M. T., & Jalunggono, G. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 4(1), 77-90.
- Hartini, I. (2022). Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Kopi di Desa Gunung Raya Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. *Jurnal Ilmu Pertanian Kelingi*, 2(1), 122-129.
- Haydarsyah, M., & Nilasari, A. (2024). Faktor Internal Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 3(3), 190-208.
- Herina, N. A., Kara, M., & Mahmud, A. K. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, dan Penetrasi Internet Terhadap Penyerap Tenaga Kerja Di

Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional Economics*, 06(01), 14-22.

Hodijah, S., Hastuti, D., Hardiani, & Nurjanah, R. (2024). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jambi: WIDA Publishing.

Juardi, & Jurais. (2021). The Effect of Government Expenditure on Employment Opportunities Through Investment in South Sulawesi Province. *United International Journal for Research & Technology*, 02(10).

Julyandi, M. F. (2022). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Science Of Management And Students Research Journal (SMS)*, 2(3), 196-203.

Larasati, N., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2020. *Journal of Economis and Business*, 7(1), 7-12.

Liana, W., & Damanik, D. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi (Teori Komprehensif dan Perkembangannya)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Munajat. (2023). *Strategi Pengembangan UMKM*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

Olivia, Y. S., & Widanta, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(06), 1186-1195.

Pratama, B. A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Upah Minimum dan Pengeluaran

- Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(8), 1396-1406.
- Pratiwi, N. A., & Indrajaya, I. B. (2019). ). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(2).
- Purba, E., & Damanik, D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupate Samosir. *Ekuilnomi*, 6(1), 67-76.
- Purnasari, N. (2021). *Metodelogi Penelitian*. Guepedia.
- Purwadinata, S., Handayani, T., & Firdaus, N. N. (2025). Analisis Aglomerasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Terhadap Kemiskinan Di Provinsi NTB. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 4(1).
- Purwanto, H., As'ari, Qorib, D. F., Sari, H. R., & Siswadi. (2025). Economic Growth and Development from An Islamic Perspective: A Literature-Based Conceptual Analysis. *E-Journal of Sharia Economics*, 01(02), 71-86.
- Rahayu, I. S., Dewi, D. K., Sukma, S. R., Irfayunita, F., & Doni, A. H. (2025). Pengaruh Inflasi, Tingkat Upah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bukit Tinggi. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14(3), 370-376.
- Rahayu, S. E. (2023). *Implementasi Kebijakan dan Pengelolaan Dana Desa terhadap Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat*. Langkat: UMSU Press.

- Rompas, W. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerpan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBI Unsrat)*, 11(3), 1724-1738.
- Rostina, F., & Srinita. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 66-75.
- Sabihi, D., Kumenaung, A., & Niode, A. (2021). Pengaruh Upah minimum Provinsi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1).
- Sadat, A. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Deepublish.
- Santoso, R. P. (2023). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Saragih, J. R. (2017). Aspek Sosioekologis Usahatani Kopi Arabika di Dataran Tinggi Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. *Sosiohumaniora*, 19(3), 253-259.
- Sari, D. (2022). *Buku Ajar Makro Ekonomi*. Surabaya: CV Global Aksara Pers.
- Simanjuntak, P. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, edisi ke-2*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Sitaniapessy, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, 9(1).
- Suharjono, M. K. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta.

- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumanto. (2022). *Hubungan Industrial (Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kepentingan Pengusaha-Pekerja pada Era Modal Global)*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Tasmilah. (2021). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(2), 92-112.
- Usman, A., Tjambolang, T. A., Zainiar, Y. M., & Syamsuddin. (2023). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Wijaya, E., & Suprayitno, D. (2024). *Buku Ajar Ekonometrika*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wiraja, A., & Marwan. (2023). Inflasi, Upah Minimum Regional, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Daya Serap Tenaga Kerja. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 580-585.
- Yanda, F. A., Saleh, S. E., & S Dai, S. I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 101-111.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Data Variabel

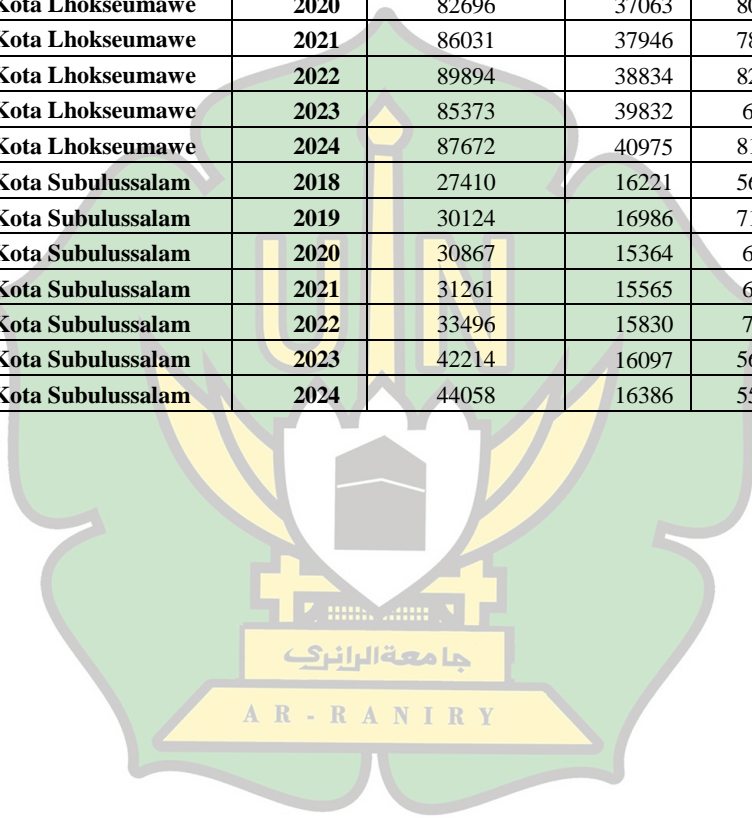
Kabupaten/Kota	Tahun	PTK	PDRB	PP
Simeulue	2018	38871	16561	845.89
Simeulue	2019	38142	16996	986.52
Simeulue	2020	43819	17297	815.26
Simeulue	2021	44964	17614	872.99
Simeulue	2022	41268	18061	809.95
Simeulue	2023	47502	18602	785.48
Simeulue	2024	48472	19128	1055.36
Aceh Singkil	2018	45633	13681	742.72
Aceh Singkil	2019	42688	14178	887.69
Aceh Singkil	2020	45960	13602	860.47
Aceh Singkil	2021	47474	13863	889.25
Aceh Singkil	2022	44866	14096	859.06
Aceh Singkil	2023	49732	14329	730.06
Aceh Singkil	2024	50982	14561	877.43
Aceh Selatan	2018	104772	17283	1353.58
Aceh Selatan	2019	95823	17755	1481.26
Aceh Selatan	2020	101713	18293	1376.08
Aceh Selatan	2021	102702	18542	1335
Aceh Selatan	2022	106060	18912	1373.82
Aceh Selatan	2023	102607	19372	1382.61
Aceh Selatan	2024	104440	19787	1407.43
Aceh Tenggara	2018	99370	15546	1183.21
Aceh Tenggara	2019	94054	16143	1350.62
Aceh Tenggara	2020	99301	15624	1326.68
Aceh Tenggara	2021	97983	15604	1274.69
Aceh Tenggara	2022	98670	15768	1226.13
Aceh Tenggara	2023	111715	15996	1089.32
Aceh Tenggara	2024	114161	16320	1286.14
Aceh Timur	2018	176678	18248	1598.09

<b>Aceh Timur</b>	<b>2019</b>	161525	18951	1977.09
<b>Aceh Timur</b>	<b>2020</b>	172680	19641	1790.13
<b>Aceh Timur</b>	<b>2021</b>	169091	19756	1838.59
<b>Aceh Timur</b>	<b>2022</b>	167569	20226	1760
<b>Aceh Timur</b>	<b>2023</b>	172928	20385	1720.94
<b>Aceh Timur</b>	<b>2024</b>	177800	21064	1956.18
<b>Aceh Tengah</b>	<b>2018</b>	103145	27045	1237.33
<b>Aceh Tengah</b>	<b>2019</b>	104165	27910	1385.66
<b>Aceh Tengah</b>	<b>2020</b>	116594	26865	1387.14
<b>Aceh Tengah</b>	<b>2021</b>	113900	27342	1351.02
<b>Aceh Tengah</b>	<b>2022</b>	113939	28304	1264.27
<b>Aceh Tengah</b>	<b>2023</b>	119289	29496	1159.26
<b>Aceh Tengah</b>	<b>2024</b>	122392	30569	1358.22
<b>Aceh Barat</b>	<b>2018</b>	74832	32155	1216.33
<b>Aceh Barat</b>	<b>2019</b>	86272	33661	1366.76
<b>Aceh Barat</b>	<b>2020</b>	86102	35728	1330.25
<b>Aceh Barat</b>	<b>2021</b>	88790	37408	1343.67
<b>Aceh Barat</b>	<b>2022</b>	87930	38216	1330.74
<b>Aceh Barat</b>	<b>2023</b>	86228	39363	1255.65
<b>Aceh Barat</b>	<b>2024</b>	88793	41896	1575.09
<b>Aceh Besar</b>	<b>2018</b>	163289	22913	1722.23
<b>Aceh Besar</b>	<b>2019</b>	159151	23844	1841.6
<b>Aceh Besar</b>	<b>2020</b>	173332	24762	1910.39
<b>Aceh Besar</b>	<b>2021</b>	181190	25009	1891.45
<b>Aceh Besar</b>	<b>2022</b>	194117	25597	1848.39
<b>Aceh Besar</b>	<b>2023</b>	189576	26337	1616.92
<b>Aceh Besar</b>	<b>2024</b>	194714	27262	1860.37
<b>Pidie</b>	<b>2018</b>	181668	16966	1981.01
<b>Pidie</b>	<b>2019</b>	189700	17580	2153.27
<b>Pidie</b>	<b>2020</b>	201426	17894	2048.42
<b>Pidie</b>	<b>2021</b>	187284	18168	1992.34
<b>Pidie</b>	<b>2022</b>	209079	18696	2079.53
<b>Pidie</b>	<b>2023</b>	195538	19237	1773.92
<b>Pidie</b>	<b>2024</b>	200277	19837	2111.24
<b>Bireun</b>	<b>2018</b>	209033	20762	1761.17
<b>Bireun</b>	<b>2019</b>	219280	21696	1926.16

<b>Bireun</b>	<b>2020</b>	223443	22869	1888.99
<b>Bireun</b>	<b>2021</b>	223237	23500	1963.84
<b>Bireun</b>	<b>2022</b>	222404	24192	1915.59
<b>Bireun</b>	<b>2023</b>	213207	24921	1683.11
<b>Bireun</b>	<b>2024</b>	217882	25718	2090.89
<b>Aceh Utara</b>	<b>2018</b>	244116	26636	2250.88
<b>Aceh Utara</b>	<b>2019</b>	243548	27374	2636.89
<b>Aceh Utara</b>	<b>2020</b>	244358	28292	2518.46
<b>Aceh Utara</b>	<b>2021</b>	241329	27728	2398.34
<b>Aceh Utara</b>	<b>2022</b>	239537	28686	2500.74
<b>Aceh Utara</b>	<b>2023</b>	250069	28502	2354.53
<b>Aceh Utara</b>	<b>2024</b>	255249	29187	2609.46
<b>Aceh Barat Daya</b>	<b>2018</b>	65484	19358	814
<b>Aceh Barat Daya</b>	<b>2019</b>	60893	20057	1002.64
<b>Aceh Barat Daya</b>	<b>2020</b>	61656	19857	966.55
<b>Aceh Barat Daya</b>	<b>2021</b>	63268	20128	903.35
<b>Aceh Barat Daya</b>	<b>2022</b>	65692	20604	912.9
<b>Aceh Barat Daya</b>	<b>2023</b>	68328	21208	833.63
<b>Aceh Barat Daya</b>	<b>2024</b>	69868	21700	910.54
<b>Gayo Lues</b>	<b>2018</b>	47632	20476	872.24
<b>Gayo Lues</b>	<b>2019</b>	46440	20682	997.3
<b>Gayo Lues</b>	<b>2020</b>	54422	19548	922.03
<b>Gayo Lues</b>	<b>2021</b>	51023	19616	865.73
<b>Gayo Lues</b>	<b>2022</b>	51986	19924	811
<b>Gayo Lues</b>	<b>2023</b>	57083	20339	794.44
<b>Gayo Lues</b>	<b>2024</b>	58644	20627	859.75
<b>Aceh Tamiang</b>	<b>2018</b>	131080	19663	1124.42
<b>Aceh Tamiang</b>	<b>2019</b>	126576	20364	1312.59
<b>Aceh Tamiang</b>	<b>2020</b>	125650	20473	1193.04
<b>Aceh Tamiang</b>	<b>2021</b>	133865	20384	1170.29
<b>Aceh Tamiang</b>	<b>2022</b>	133028	20777	1281.92
<b>Aceh Tamiang</b>	<b>2023</b>	144661	20975	1121.83
<b>Aceh Tamiang</b>	<b>2024</b>	148501	21597	1121.83
<b>Nagan Raya</b>	<b>2018</b>	67843	37186	987.05
<b>Nagan Raya</b>	<b>2019</b>	70676	39666	1126.91
<b>Nagan Raya</b>	<b>2020</b>	77800	40229	1132.52
<b>Nagan Raya</b>	<b>2021</b>	77464	41383	1085.78
<b>Nagan Raya</b>	<b>2022</b>	80071	42157	1054.97

<b>Nagan Raya</b>	<b>2023</b>	78687	44486	1177.27
<b>Nagan Raya</b>	<b>2024</b>	80584	45886	1177.27
<b>Aceh Jaya</b>	<b>2018</b>	44822	21209	792.02
<b>Aceh Jaya</b>	<b>2019</b>	46503	21475	921.79
<b>Aceh Jaya</b>	<b>2020</b>	50080	21360	903.08
<b>Aceh Jaya</b>	<b>2021</b>	49543	21538	920.48
<b>Aceh Jaya</b>	<b>2022</b>	48490	21952	910.05
<b>Aceh Jaya</b>	<b>2023</b>	48052	22492	770.66
<b>Aceh Jaya</b>	<b>2024</b>	49463	22985	890.33
<b>Bener Meriah</b>	<b>2018</b>	78346	23962	879.57
<b>Bener Meriah</b>	<b>2019</b>	78832	24835	1031.79
<b>Bener Meriah</b>	<b>2020</b>	86050	22630	970.48
<b>Bener Meriah</b>	<b>2021</b>	82201	22962	994.76
<b>Bener Meriah</b>	<b>2022</b>	84713	23338	924.79
<b>Bener Meriah</b>	<b>2023</b>	98958	24142	868.03
<b>Bener Meriah</b>	<b>2024</b>	101632	24524	1030.77
<b>Pidie Jaya</b>	<b>2018</b>	65765	15823	1196.17
<b>Pidie Jaya</b>	<b>2019</b>	66814	16418	1022.73
<b>Pidie Jaya</b>	<b>2020</b>	68507	16362	1030.25
<b>Pidie Jaya</b>	<b>2021</b>	66881	16466	951.84
<b>Pidie Jaya</b>	<b>2022</b>	67784	16826	976.53
<b>Pidie Jaya</b>	<b>2023</b>	70066	17310	929.48
<b>Pidie Jaya</b>	<b>2024</b>	71550	17869	972.02
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>2018</b>	114210	54909	1173.87
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>2019</b>	119131	56528	1230.05
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>2020</b>	118637	58022	1272.35
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>2021</b>	124460	60470	1207.57
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>2022</b>	118876	62822	1334.88
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>2023</b>	113790	65198	1218.9
<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>2024</b>	116723	68364	1342.4
<b>Kota Sabang</b>	<b>2018</b>	15409	31096	599.24
<b>Kota Sabang</b>	<b>2019</b>	17234	33133	676.39
<b>Kota Sabang</b>	<b>2020</b>	17194	27430	634.61
<b>Kota Sabang</b>	<b>2021</b>	15704	27664	679.56
<b>Kota Sabang</b>	<b>2022</b>	16851	27962	597.67
<b>Kota Sabang</b>	<b>2023</b>	20162	28389	534.57
<b>Kota Sabang</b>	<b>2024</b>	20957	29175	563.08
<b>Kota Langsa</b>	<b>2018</b>	72292	21192	792.04
<b>Kota Langsa</b>	<b>2019</b>	78702	21876	930.31

<b>Kota Langsa</b>	<b>2020</b>	77618	20596	860.02
<b>Kota Langsa</b>	<b>2021</b>	81655	21040	885.08
<b>Kota Langsa</b>	<b>2022</b>	78674	21677	851.77
<b>Kota Langsa</b>	<b>2023</b>	81580	22220	825.55
<b>Kota Langsa</b>	<b>2024</b>	83540	22833	956.67
<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>2018</b>	71977	33651	775.48
<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>2019</b>	80463	34818	873.47
<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>2020</b>	82696	37063	809.12
<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>2021</b>	86031	37946	786.58
<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>2022</b>	89894	38834	825.51
<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>2023</b>	85373	39832	682.2
<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>2024</b>	87672	40975	815.79
<b>Kota Subulussalam</b>	<b>2018</b>	27410	16221	562.25
<b>Kota Subulussalam</b>	<b>2019</b>	30124	16986	713.31
<b>Kota Subulussalam</b>	<b>2020</b>	30867	15364	605.3
<b>Kota Subulussalam</b>	<b>2021</b>	31261	15565	651.7
<b>Kota Subulussalam</b>	<b>2022</b>	33496	15830	747.3
<b>Kota Subulussalam</b>	<b>2023</b>	42214	16097	564.82
<b>Kota Subulussalam</b>	<b>2024</b>	44058	16386	558.84



## Lampiran 2: Hasil-Hasil Uji

### Uji Chow

Equation: Untitled Redundant Fixed Effects Tests

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	112.986246	(22,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	476.386501	22	0.0000

Sample: 2018 2024  
Periods included: 7

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: LOG\_PTK  
Method: Panel Least Squares  
Date: 01/21/26 Time: 16:54

Cross-sections included: 23  
Total panel (balanced) observations: 161

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.343929	0.707269	-0.486278	0.6274
LOG(PDRB)	0.099048	0.062067	1.595825	0.1125
LOG_PP	1.521573	0.058154	26.16468	0.0000
Root MSE	0.270253	R-squared	0.817033	
Mean dependent var	11.35975	Adjusted R-squared	0.814717	
S.D. dependent var	0.633777	S.E. of regression	0.272807	
Akaike info criterion	0.258351	Sum squared resid	11.75891	
Schwarz criterion	0.315768	Log likelihood	-17.79723	
Hannan-Quinn criter.	0.281665	F-statistic	352.7711	
Durbin-Watson stat	0.440790	Prob(F-statistic)	0.000000	

## Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	121.015291	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PDRB)	0.578360	0.410455	0.004283	0.0103
LOG_PP	-0.191623	0.198169	0.001258	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG\_PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 01/21/26 Time: 17:05

Sample: 2018 2024

Periods included: 7

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 161

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.889098	1.163692	5.920037	0.0000
LOG(PDRB)	0.578360	0.111017	5.209674	0.0000
LOG_PP	-0.191623	0.075848	-2.526409	0.0127

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.061553	R-squared	0.990509
Mean dependent var	11.35975	Adjusted R-squared	0.988834
S.D. dependent var	0.633777	S.E. of regression	0.066972
Akaike info criterion	-2.427280	Sum squared resid	0.609991
Schwarz criterion	-1.948801	Log likelihood	220.3960
Hannan-Quinn criter.	-2.232998	F-statistic	591.3656
Durbin-Watson stat	0.954492	Prob(F-statistic)	0.000000

## Model Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG\_PTK  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 01/22/26 Time: 12:51  
 Sample: 2018 2024  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 23  
 Total panel (balanced) observations: 161

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.889098	1.163692	5.920037	0.0000
LOG_PE	0.578360	0.111017	5.209674	0.0000
LOG_PP	-0.191623	0.075848	-2.526409	0.0127

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.061553	R-squared	0.990509
Mean dependent var	11.35975	Adjusted R-squared	0.988834
S.D. dependent var	0.633777	S.E. of regression	0.066972
Akaike info criterion	-2.427280	Sum squared resid	0.609991
Schwarz criterion	-1.948801	Log likelihood	220.3960
Hannan-Quinn criter.	-2.232998	F-statistic	591.3656
Durbin-Watson stat	0.954492	Prob(F-statistic)	0.000000

## Uji Asumsi Klasik

### Multikolinearitas

	A R - R A PDRB R Y	PP
PDRB	1.000000	0.050530
PP	0.050530	1.000000

## Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.889098	1.163692	5.920037	0.0000
LOG_PE	0.578360	0.111017	5.209674	0.0000
LOG_PP	-0.191623	0.075848	-2.526409	0.0127

## Analisis Deskriptif

	PTK	PDRB	PP
Mean	102933.6	25066.46	1221.579
Median	86050.00	21360.00	1089.320
Maximum	255249.0	68364.00	2636.890
Minimum	15409.00	13602.00	534.5700
Std. Dev.	60562.67	10601.38	481.6695
Skewness	0.851680	1.930887	0.972368
Kurtosis	2.799852	6.966684	3.253246
Jarque-Bera Probability	19.73254 0.000052	205.5962 0.000000	25.80116 0.000002
Sum	16572311	4035700.	196674.2
Sum Sq. Dev.	5.87E+11	1.80E+10	37120888
Observations	161	161	161

